

**PERILAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT PESISIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM**
(Studi Kasus Pada Nelayan Dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak,
Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Jawa Timur)

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Oleh :
RATIH PRITA DEWI
0410840052



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2009**

SKRIPSI

PERILAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT PESISIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Studi Kasus Pada Nelayan Dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak,
Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Jawa Timur)

Oleh :
RATIH PRITA DEWI
NIM. 0410840052

telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 19 Juni 2009 dinyatakan
telah memenuhi syarat

Mengetahui,

Dosen Penguji I

Dosen Pembimbing I

(Wahyu Handayani, S.Pi)

(Ir. Mimit Primyastanto, MP)

Tanggal :

Tanggal :

Dosen Penguji II

Dosen Pembimbing II

(Zainal Abidin, S. Pi)

(Ir. Edi Susilo, MS)

Tanggal :

Tanggal :

Ketua Jurusan,

(Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP)

Tanggal :

**PERILAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT PESISIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM**
(Studi Kasus Pada Nelayan Dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak,
Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Jawa Timur)

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana

Oleh :
RATIH PRITA DEWI
NIM. 0410840052



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2009**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 23 Juni 2009
Mahasiswa

RATIH PRITA DEWI



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahman nirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tiada Illah selain Dia. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada makhluk terbaik Nabi kita dan pemimpin kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa Salam, keluarga dan para sahabat beliau. Atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan skripsi dengan judul “Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Terhadap Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Nelayan Dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Jawa Timur)”. Di dalam laporan ini, terdapat pokok-pokok bahasan yaitu: Mengetahui alasan yang mendasari masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) dalam merusak sumberdaya pesisir, Mengetahui pengetahuan, pemahaman dan dukungan masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) terhadap peraturan pemerintah dan pemahaman Al-Qur’an tentang menjaga lingkungan wilayah pesisir, serta mengetahui konsistensi isu-isu lingkungan pada pengelolaan lingkungan wilayah pesisir yang terdapat pada Undang-Undang, dan relevansi dengan isu-isu lingkungan yang ada di Kitab Suci Al-Qur’an.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, walaupun telah berusaha dengan seluruh kemampuan penulis untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan sehingga saran dan masukan sangat diperlukan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Sehubungan dengan selesainya laporan ini, dengan segenap hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Mimit Primyastanto, MP selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar dalam menyusun laporan ini.
2. Bapak Ir. Edi Susilo, MS selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar mulai dari proses penyusunan usulan skripsi di tengah kesibukan beliau yang sangat padat dan memberikan banyak masukan berharga kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi hingga penulisan laporan ini.

3. Kepada Ibu Wahyu Handayani, S.Pi dan Bapak Zainal Abidin, S.Pi selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan yang berharga didalam laporan ini.
4. Teruntuk Abi dan Umi tersayang, terima kasih tidak terhingga atas dorongan material dan spritual sehingga nantinya ananda akan sukses dalam menempuh hidup.
5. Para responden Bapak H. Ahmad Tekad Sholeh, Bapak Seharinoto Hadi, Bapak Samingun, Ibu Sugiah, Ibu Satilah, Bapak Tukiman Gembong, terima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang telah diberikan selama penelitian di Desa Tambakrejo.
6. Pegawai Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), terutama kepada Ibu Drh. AM. Andjari Laksmayuni (SubBagian Bina Program) atas waktu dan informasinya di dalam penelitian ini.
7. Kantor Desa Tambakrejo, terutama kepada Bapak Surani (Kepala Desa) dan Bapak Boiman (Sekretaris Desa Tambakrejo) atas waktu dan informasi tentang Desa Tambakrejo untuk membantu penyusunan laporan ini.
8. Rekan–rekan Perikanan Semoga Allah membalas semuanya dengan balasan yang sangat baik.

Penulis menyadari segala sesuatu tidak ada yang sempurna, begitu juga dalam penyusunan laporan ini oleh karenanya saran dan kritik dari pembaca sangat diterima penulis untuk laporan ini.

Dari laporan Skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan penambah wawasan bagi pembaca.

Malang, 23 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

RATIH PRITA DEWI, Skripsi Tentang Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Nelayan dan Pedagang Ikan Di Kawasan Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Jawa Timur) (dibawah bimbingan **Ir. Mimit Primyastanto, MP** dan **Ir. Edi Susilo, MS**).

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001).

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan khususnya wilayah pesisir secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri dalam menjaga kelestarian dan sumberdaya ekosistem pesisir pantai. Dengan adanya peraturan dari Pemerintah dan Agama serta dukungan dari masyarakat kerusakan lingkungan akan terjaga kelestariannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui alasan yang mendasari masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) dalam merusak sumber daya pesisir, (2) mengetahui pengetahuan, pemahaman dan dukungan masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) terhadap peraturan pemerintah dan pemahaman Al-Qur'an tentang menjaga lingkungan wilayah pesisir, (3) Mengetahui konsistensi isu-isu lingkungan pada pengelolaan lingkungan wilayah pesisir yang terdapat pada Undang-Undang, dan relevansi dengan isu-isu lingkungan yang ada di Kitab Suci Al-Qur'an.

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur pada bulan Januari 2009, dengan obyek penelitian nelayan dan pedagang ikan di Desa Tambakrejo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 metode: yang pertama adalah survey, yang kedua studi kasus (*case study*), dan yang ketiga *Content Analysis* (analisis isi).

Penduduk Desa Tambakrejo sebagian besar adalah beragama Islam dan suku Jawa dengan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Jawa. Jumlah penduduk di Desa Tambakrejo pada tahun 2005 keseluruhan 4465 jiwa yang terdiri dari 2180 jiwa penduduk laki-laki dan 2285 jiwa penduduk perempuan.

Faktor kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya wilayah pesisir dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dari mulainya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan rendahnya tingkat pendidikan yang secara tidak langsung mempengaruhi pola berfikir didalam melakukan tindakan masyarakat Desa Tambakrejo.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan yang ada di Desa Tambakrejo adalah: sejauh mana pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang dalam penjagaan dan pengelolaan yang ramah lingkungan tanpa merusak ekosistem wilayah pesisir, pengetahuan masyarakat terhadap Agama dibidang lingkungan yang terdapat pada Al-Qur'an, dan alasan/motivasi yang melatar belakangi masyarakat dalam merusak lingkungan wilayah pesisir. Dari hasil analisis regresi didapat bahwa variabel pengetahuan masyarakat terhadap Agama berpengaruh secara nyata terhadap variabel kerusakan lingkungan, sedangkan variabel alasan/motivasi masyarakat merusak lingkungan dan pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang tidak berpengaruh nyata terhadap variabel kerusakan lingkungan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan: (1) Harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam menjalankan kebijakan yang direncanakan dalam pembangunan khususnya wilayah pesisir dan juga hukum dalam Kitab Suci Al-Qur'an, (2) Status kerusakan sumberdaya yang terjadi diakibatkan karena masyarakat setempat tidak menjaga lingkungan dengan baik, yang mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan sehingga mau tidak mau pemerintah dan masyarakat sekitar harus saling bekerjasama untuk mengadakan rehabilitasi hutan mangrove, (3) Penyadaran melalui jalur pendidikan adalah salah satu sarana untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat setempat, (4) Diharapkan agar dalam proses penyadaran terhadap status kerusakan yang terjadi di desa tambakrejo agar masyarakat sadar dan segera melakukan proses rehabilitasi terhadap kerusakan apa saja yang terjadi sebelum semuanya terlambat untuk diperbaiki, (5) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar responden yang diambil dapat mewakili semua *stakeholder* dan lebih banyak mengetahui tentang apa saja jenis kerusakan yang terjadi yang ada hubungannya dengan penelitian.



DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perilaku.....	10
2.1.1 Pengertian Perilaku.....	10
2.2 Lingkungan.....	11
2.2.1 Istilah dan Definisi Lingkungan.....	11
2.2.2 Teori Tentang Lingkungan.....	12
2.3 Masyarakat.....	13
2.3.1 Islam Dan Budaya Jawa.....	15
2.4 Wilayah Pesisir dan Pantai.....	17
2.4.1 Karakteristik Wilayah Pesisir.....	20
2.4.2 Bentuk dan Tipe Geomorfologi Pantai.....	21
2.4.3 Tipe-Tipe Pantai.....	22
2.5 Ekosistem di Wilayah Pesisir.....	23
2.5.1 Ekosistem Pesisir yang Tergenang Air.....	24
2.5.1.1 Terumbu Karang.....	24
2.5.1.2 Lamun.....	26
2.5.1.3 Ekosistem Hutan Mangrove.....	29
2.5.1.4 Estuari.....	32
2.5.1.5 Rumput Laut.....	34
2.5.2 Ekosistem Pesisir yang Tidak Tergenang Air.....	34
2.6 Teologi Lingkungan Menurut Islam.....	35
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
3.2 Metode Penelitian.....	44
3.3 Survey.....	44
3.3.1 Langkah-Langkah dalam Pelaksanaan Survey.....	45
3.3.2 Populasi dan Sampel.....	45
3.3.3 Variabel Penelitian.....	46
3.3.4 Definisi Operasional.....	47
3.3.5 Regresi Linier Berganda.....	47



3.4 Studi Kasus (<i>case study</i>).....	49
3.4.1 Identifikasi <i>Stakeholder</i>	49
3.4.2 Proses Studi Kasus	51
3.4.3 Kata Kunci yang akan Ditanya.....	52
3.4.4 Bagan Analisa Desain	52
3.5 <i>Content Analysis</i> (Analisa Isi).....	52
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Geografis dan Topografis	55
4.1.2 Potensi Sumberdaya Manusia.....	56
4.2 Keadaan Umum Lokasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar	60
4.3 Keadaan Wilayah Pesisir Kabupaten Blitar	64
4.4 Kerusakan Lingkungan yang Terjadi di Wilayah Pesisir.....	65
4.4.1 Jenis Kerusakan	65
4.4.2 Penyebab Kerusakan	67
4.5 Alasan yang Mendasari Nelayan Merusak Sumberdaya Pesisir.....	69
4.5.1 Faktor Ekonomi yang Mendasari Nelayan Merusak Sumberdaya Pesisir	69
4.5.2 Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Wilayah Pesisir	71
4.6 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Undang-Undang dan Nilai-Nilai Religi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.....	80
4.6.1 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Undang-Undang	80
4.6.2 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Religi	82
4.7 Analisis Regresi Berganda	87
4.8 Konsistensi Substansi Pengelolaan Lingkungan Pesisir Undang-Undang dengan Al-Qur'an.....	90
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	101
VI. DAFTAR PUSTAKA	105
VII. LAMPIRAN	108

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, membuat bangsa Indonesia harus berupaya secara sungguh-sungguh untuk keluar dari krisis ekonomi, salah satu upaya untuk mengatasi krisis ini adalah mengembangkan berbagai sektor riil yang dapat menghasilkan barang dan jasa dengan keunggulan komperatif dan kompetitif yang tinggi. Sektor-sektor riil yang potensial untuk membantu pemecahan krisis total tersebut adalah kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya pesisir, kekayaan laut dan jasa lingkungan pesisir. Kegiatan ekonomi ini meliputi: perikanan, pariwisata bahari, pertambangan lepas pantai, perhubungan laut, industri maritim dan pembangunan infrastruktur pendukung (Idris, 2001).

Indonesia merupakan negara bahari dengan 70 persen wilayahnya adalah persaingan, sehingga laut merupakan lingkungan fisik yang menonjol. Secara rinci Apriliani LON LIPI (sekarang Pusat Kajian Kelautan) menyetengahkan data sebagai berikut. Indonesia memiliki 13.667 buah pulau (belum termasuk pulau yang berada di sekitar Timor Timur). Perairan lautnya, berdasarkan perhitungan batas 12 mil laut, ada sekitar 5,1 juta kilometer persegi. Berdasarkan konsep paparan benua (kedalaman 200 m) Indonesia memiliki tambahan luas sekitar 3 juta kilometer persegi. Sedangkan berdasarkan wilayah ekonomi eksklusif 200 mil laut, maka keluasan wilayahnya bertambah sekitar 2,7 juta kilometer persegi. Indonesia juga memiliki pantai terpanjang di dunia (sekitar 81.000 juta kilometer), sedangkan keluasan perairan tawar terbuka sekitar 13,7 juta hektar (Apriliani, 1985).

Indonesia terletak digaris katulistiwa, yaitu terletak antara $94^{\circ} 45'$ dan $141^{\circ} 05'$ Bujur Timur, dan antara $6^{\circ} 01'$ Lintang Utara dan $11^{\circ} 15'$ Lintang Selatan. Perairan Indonesia terdiri atas dua paparan benua yang dangkal yaitu paparan Sunda dan Sahul yang dipisahkan oleh laut dan selat yang dalam.

Kehidupan manusia seolah sudah semakin menyusahkan dan menyulitkan. Belum usai konflik perang antar manusia yang sangat melelahkan dan memakan banyak korban, ketenangan kehidupan manusia kembali terancam. Alam, baik itu darat, laut dan udara, seolah tanpa henti terus menerus mengusik ketenangan kehidupan manusia.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah: pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Supriharyono, 2000).

Wilayah pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Wilayah ini bukan hanya merupakan sumber pangan yang di usahakan melalui kegiatan perikanan dan pertanian, tetapi merupakan pula lokasi bermacam sumber daya alam, seperti mineral, gas dan minyak bumi serta pemandangan alam yang indah, yang dapat di manfaatkan untuk kesejahteraan manusia, perairan pesisir juga penting artinya sebagai pelayaran (Pagoray, 2003).

Akhir tahun 2004, terlebih negara-negara Asia Selatan dan Tenggara di kawasan pesisir samudra hindia, dunia dikejutkan oleh gelombang tsunami yang

menelan jutaan nyawa manusia. Setelah itu, seolah tanpa henti, alam terus bergerak menebar ancaman bagi kehidupan manusia (Delianur, 2007).

Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Komponen yang ada di sekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupan bagi manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan komponen lainnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang berguna bagi dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup (Syahputra, 2007).

Sumberdaya pesisir merupakan unsur-unsur hayati dan nonhayati yang terdapat di wilayah laut, dimana unsur hayati terdiri atas ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota lain beserta ekosistemnya. Unsur nonhayati terdiri dari sumberdaya di lahan pesisir, permukaan air, di dalam airnya dan di dasar laut seperti: minyak dan gas, pasir kuarsa, timah dan karang mati. Sumberdaya hayati yang dimanfaatkan dapat diperbaharui selama laju regenerasi sumberdayanya masih layak untuk berkembang secara alami. Sedang substitusi sumberdaya tersebut untuk menggantikan fungsinya (Idris, 2001).

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya dan beragam. Kekayaan ini melahirkan minat berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk memanfaatkannya. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mendorong upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut dari stakeholder terutama instansi sektoral. Undang-undang yang memberi kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Daerah ini memberi konsekuensi

kepada makin intensinya kebijakan publik berupa program sektoral dari masing-masing Lembaga Pemerintah Daerah.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin parah, dan dampak dari pola pengelolaan lingkungan yang salah dan eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab membuat kondisi semakin memprihatinkan. Hampir setiap hari berbagai cerita duka akibat rusaknya lingkungan hidup mewarnai media masa, seperti bencana banjir, tanah longsor, kabut asap, tragedi lumpur lapindo, dan lain-lain. Seiring dengan itu, muncul pula berita terungkapnya pembalakan liar, pembakaran hutan, dan pembangunan gedung-gedung atau proyek lain yang tidak mengindahkan tata letak dan prosedur perizinan dan masih banyak lagi perilaku yang tidak terpuji yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Garnasih, 2008).

Masih dalam Garnasih, (2008) Namun ironisnya, permasalahan penanganan dan penegakan hukum atas perusakan lingkungan hidup justru sangat lemah. Hukum lingkungan Hidup nyaris tumpul tidak berdaya menghadapi berbagai perkara kejahatan lingkungan.

Pesisir mempunyai fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang sangat tinggi. Berbagai aktivitas dan kepentingan bertumpu pada sumbernya tersebut menyebabkan tingginya beban yang harus didukung oleh ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir sangat produktif dengan *biodiversitas* yang sangat beragam sekaligus merupakan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan. Berbagai rekayasa pesisir untuk mengatasi permasalahan kadang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan rekayasa tersebut bahkan memperparah keadaan (Diposaptono, 2001).

Masalah lingkungan hidup dapat muncul karena adanya sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang berlebihan sehingga meningkatkan berbagai tekanan terhadap lingkungan hidup, baik dalam bentuk kelangkaan sumberdaya

dan pencemaran maupun kerusakan lingkungan lainnya. Berbagai masalah lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan pemanasan global, kepunahan jenis flora dan fauna serta melebarnya lubang lapisan ozon, pencemaran dan kemiskinan, telah menjadi masalah global karena meliputi seluruh bagian bumi (Syahputra, 2007).

Permasalahan lingkungan hidup adalah makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Bapedal, 1997 dalam Pagoray, 2003).

Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena adanya kegiatan (aktivitas) yang dilakukan oleh manusia maupun karena pengaruh alam. Salah satu akibat samping dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan daerah adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut telah menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup (Tandjung, 1991 dalam Pagoray, 2003).

Kenyataannya menunjukkan, bahwa peran serta masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan pemerintah naik itu suatu pembangunan, kebijakan-kebijakan ataupun usaha rehabilitasi dan perbaikan masih jarang terjadi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua sebab mengapa perilaku perusakan lingkungan masyarakat pesisir di Indonesia masih rendah, pertama: masyarakat berfikir bahwa hal tersebut adalah urusan pemerintah dan apabila terjadi perusakan itupun menjadi tanggung jawab dari pemerintah, yang kedua: bahwa kurangnya kesadaran antara pemerintah dan masyarakat wilayah pesisir dalam bekerja sama untuk menjaga wilayah pesisir dari kerusakan.

Penyusunan perencanaan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh manusia dipengaruhi oleh faktor internal individual dan faktor eksternal sosial. Pengaruh internal individual dapat berupa dorongan fisik lahiriah sebagai upaya penemuan kesejahteraan ekonomis. Demikian pula dapat berupa dorongan nonfisik intelektual dan perasaan. Dalam arti, perbedaan individual dengan berbagai kepastiannya akan mempengaruhi perbedaan dalam menyusun perencanaan dan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001).

Islam adalah agama rahmatan lil Alamin, artinya Islam diyakini tidak hanya diperuntukan bagi kalangan pemeluknya sendiri. Islam merupakan rahmat bagi pemeluk agama lain, bangsa non-arab, bahkan tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lain (Zainal, 2007).

Menurut sejarah etika lingkungan, *ecosophy* bukanlah hal yang baru. Gagasan ini ditawarkan oleh Arne Naess dalam bukunya *Ecology, Community and Lifestyle* (1993). Dari segi etimologinya, kata *ecosophy* merupakan kombinasi dari dua kata, yakni *eco* yang artinya rumah tangga dan *sophy* yang berarti kearifan. Secara bebas dapat dikatakan, *ecosophy* berarti kearifan dalam mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam pengertian yang luas (Sitohang, 2008).

Gerakan pedagogi paling efektif bagi masyarakat agraris adalah internalisasi nilai-nilai agama, tidak salah untuk memformulasi paradigma teologi agama terhadap lingkungan. Apabila usaha perlindungan lingkungan dengan memberi status hutan lindung, taman hutan rakyat, dan taman nasional tidak berpengaruh, kita butuh tambahan berupa pemahaman agama, *teologis*, yang bervisi lingkungan (Delianiur, 2007).

Melalui Kitab Suci Al-Quran, Allah telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah lingkungan. Informasi tersebut memberikan sinyalaman bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah. Melalui Kitab Suci yang Agung ini (Al-Qur'an) membuktikan bahwa Islam adalah yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Rusaknya ekosistem mangrove, terumbu karang, lamun, dan estuari berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan untuk sumberdaya ikan serta erosi pantai. Sehingga terjadi kerusakan tempat pemijahan dan daerah asuhan ikan, berkurangnya populasi benur, nener, dan produktivitas tangkap udang.

Agama terutama Islam sebenarnya mempunyai pandangan (konsep) yang sangat jelas tentang hubungan manusia dengan alam ini. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhan. Dengan kata lain, perilaku manusia terhadap alam lingkungannya merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Dalam Islam, menjaga alam dan memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga dan memelihara kehidupan di alam, dan hukumnya wajib bagi siapapun

seperti wajibnya mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa dibulan ramadhan dan berhaji. Islam merupakan agama yang sangat peduli lingkungan (*eco-friendly*), baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Konsep Islam tentang lingkungan ini ternyata sebagian telah diadopsi dan menjadi prinsip etika lingkungan yang dikembangkan oleh para ilmuwan lingkungan.

Akan tetapi konsep (ajaran) Islam yang sangat jelas ini tampaknya masih belum banyak dipahami apalagi dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungan yang sebagian besar umat Islam yang jumlahnya tidak kurang dari sepertiga penduduk dunia. Hal ini ditandai dari kerusakan lingkungan yang terjadi baik dalam lingkup nasional maupun *global*, ternyata sebagian besar terjadi di lingkungan yang mayoritas penduduknya muslim. Atau barangkali dalam hal ini disebabkan oleh terjadinya kesalahan dalam pemahaman ajaran agama serta cara pendekatan yang dipilih oleh para pemeluk Islam di negara kita khususnya dan juga umat Islam pada umumnya.

Berdasarkan rumusan yang telah dijelaskan diatas, maka muncul beberapa masalah utama yang akan menjadi pokok bahasan yaitu:

1. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat pesisir merusak sumber daya laut
2. Sejauh mana masyarakat mengetahui pengetahuan, pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap peraturan dari pemerintah dan nilai-nilai lingkungan dalam Al-Qur'an tentang menjaga lingkungan wilayah pesisir
3. Apakah substansi Undang-Undang sudah konsisten dengan nilai-nilai lingkungan yang terdapat pada Al-Qur'an

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Alasan yang mendasari masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) dalam merusak sumber daya pesisir.
2. Pengetahuan, pemahaman dan dukungan masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) terhadap peraturan pemerintah dan pemahaman Al-Qur'an tentang menjaga lingkungan wilayah pesisir.
3. Konsistensi isu-isu lingkungan pada pengelolaan lingkungan wilayah pesisir yang terdapat pada Undang-Undang, dan relevansi dengan isu-isu lingkungan yang ada di Kitab Suci Al-Qur'an.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Masyarakat pesisir, dapat digunakan dan dipakai sebagai referensi bagi masyarakat sehingga lebih memahami pentingnya melestarikan lingkungan dan meningkatkan pemahaman masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) tentang agama terhadap lingkungan khususnya wilayah pesisir.
2. Pemerintah, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan khususnya wilayah pesisir.
3. Peneliti, sebagai bahan informasi lebih lanjut terutama keterkaitan antara lingkungan khususnya wilayah pesisir dan Agama Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perilaku

2.1.1 Pengertian Perilaku

Menurut Harmoni (2008), perilaku adalah tindakan/aksi yang mengubah hubungan antara organisme dan lingkungannya. Perilaku dapat terjadi sebagai akibat stimulus dari luar. Reseptor diperlukan untuk mendeteksi stimulus, saraf diperlukan untuk mengkoordinasikan respon dan efektor untuk melaksanakan aksi.

Menurut Myers, (1983) dalam Balitbangjatim, (2006): perilaku adalah sikap yang diekspresikan (*expressed attitudes*). Perilaku dengan sikap saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sementara Kurt Lewin (1951, dalam Brigham, 1991) merumuskan satu model hubungan perilaku (B) adalah fungsi karakteristik individu (P) dan lingkungan (E), dengan rumus: $B=f(P,E)$. Karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar daripada karakteristik individu.

Perilaku atau aktivitas pada individu atau organisasi tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Perilaku individu dapat mempengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat mempengaruhi individu, demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam perspektif psikologi, perilaku manusia (*human behaviour*) dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks (Bandura, 1977; Azwar, 2003).

2.2 Lingkungan

2.2.1 Istilah dan Definisi Lingkungan

Istilah lingkungan menurut Tutik *et. al* (2008) dalam kajian ini merupakan ungkapan singkat dari lingkungan hidup. Istilah lingkungan sendiri juga sering dipadankan maknanya dengan dunia, alam semesta, planet bumi dan lainnya. Istilah ini merupakan pengalihan dari istilah asing *environment* (Inggris), *l'evironement* (Perancis), *umwely* (Jerman), *millieu* (Belanda), alam sekitar (Malaysia), kapaligiran (Tagalok), *sivatlom* (Thailand), *al-bi'ah* (Arab) dan lain-lain. Secara garis besar makna lingkungan sendiri menurut para ahli terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Lingkungan fisik (*physical environment*), yakni segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk benda tak hidup seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologis (*biological environment*), yakni segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik dan lainnya.
3. Lingkungan sosial (*social environment*), yakni manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

2.2.2 Teori Tentang Lingkungan

Dalam khazanah antropologi lingkungan telah berkembang teori yang digunakan untuk menyibakkan tirai misteri perilaku ekologis manusia. Teori-teori besar yang dominan setidaknya ada tiga macam menurut Tutik *et. al* (2008), yakni:

1. Teori Dominasi Lingkungan (*Environment Determinism atau jabariyah*)

Pada awal abad ke 20 Masehi, Friedrich Rotsel (Jerman) dan Ellen C. Semple (USA) memperkenalkan teori Dominasi Lingkungan (*Environmental Determinism*). Secara substansial teori ini merumuskan keyakinan, bahwa seluruh aspek budaya dan perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan.

Menurut Donald L. Hardesty, bahwa teori determinisme lingkungan merupakan tema yang paling menggelitik. Sebab teori ini berkeyakinan, bahwa lingkungan fisik memainkan peranan dominan sebagai pembentuk utama perilaku manusia baik kepribadian, moral, politik, pemerintahan, budaya, fisik dan agama. Perumusan teori determinasi lingkungan didasarkan pada asumsi bahwa dalam tubuh manusia terdapat empat komponen dasar, yakni: api, bumi, air dan darah. Perbedaan komposisi komponen dasar tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan fisik dan kepribadian manusia. Dengan demikian, lingkungan dipercaya sebagai pembentuk fisik dan kepribadian manusia serta perilakunya.

2. Teori Kemungkinan (*Possibilism Theory atau Tahammuliyah*)

Teori possibilisme pertama kali diperkenalkan oleh Frans Boas pada dasawarsa 1930-an. Teori *possibilisme* lahir sebagai kritik atas teori determinisme, sehingga teori ini dikenal juga sebagai *antienvironmentalism*. Walaupun demikian, bukan berarti possibilisme mengesampingkan lingkungan secara total.

Teori possibilisme berkeyakinan, bahwa lingkungan berperan penting untuk menjelaskan kecocokan antara budaya tertentu dengan lingkungannya dan ketidakcocokanya dengan lingkungan yang lain. Hal ini dilandasi oleh kenyataan, bahwa lingkungan yang berdekatan atau sejenis tidak menjamin dapat berkembang budaya dan perilaku manusia yang sama.

3. Teori Ekologi Budaya (*The Cultural Ecology* atau *Bi'ah al-hudry*)

Teori Determinisme dan teori Possibilisme merupakan turunan dari pandangan Aristoteles tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan. Inti dari dua teori lingkungan pada budaya dan perilaku manusia. Determinisme sangat kuat mengartikulasikan peran penting lingkungan pada pembentukan budaya dan perilaku manusia. Sebaliknya, possibilisme menolak determinisme. Oleh karena itu, untuk menjembatani eskirimitas kedua teori tersebut, perlu ditawarkan teori Non-Aristotelian, tetapi teori yang berbasis ekologi. Teori tersebut adalah teori Ekologi Budaya (*The Cultural Ecology*).

2.3 Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realita-realita baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya yang tersendiri. Masyarakat juga mempunyai hubungan dengan lingkungan fisik yang menghasilkan bentuk-bentuk akomodasi tertentu didalam organisasinya. Masyarakat tersusun atas dasar hakekat manusia, sedangkan bentuknya ditentukan oleh alam, dan modifikasi yang terjadi sulit ditentukan akibatnya pada manusia kecuali setelah suatu jangka waktu yang lama (Soekanto, 1983).

Sistem sosial terbentuk dari interaksi yang dilakukan oleh individu-individu. Masyarakat adalah sistem sosial dengan tingkat indenpendensi tertentu dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, tingkat indepedensi yang absolut sebetulnya tidak ada, oleh karena itu hal tersebut bertentangan dengan kedudukannya sebagai suatu sub sistem yang harus berhubungan dengan lingkungannya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan independensi adalah adanya stabilitas dalam hubungan pertukaran dengan lingkungannya serta kemampuan mengontrol. Pertukaran itu demi kelancaran jalannya usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat sendiri (Rahardjo, 1979).

Suatu masyarakat bila dilihat sebagai suatu satuan kehidupan yang tersusun dari sejumlah lembaga-lembaga yang masing-masing berhubungan satu dengan yang lain. Di dalam lembaga-lembaga itu dijumpai hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat berupa tingkah laku yang dijalankan dan diikuti suatu cara tertentu yang disepakati dalam lingkungan itu. Karena adanya cara-cara bertingkah laku tertentu yang disepakati itu, maka dalam masyarakat terbentuklah suatu pola hubungan tertentu, yaitu pola hubungan yang ditentukan oleh harapan-harapan tentang bagaimana anggota-anggota masyarakat itu hendaknya bertingkah laku. Dalam keadaan yang demikian itu maka tingkah laku anggota-anggota masyarakat tidak sekedar merupakan suatu pergerakan badaniah, melainkan tindakan yang memenuhi harapan tertentu yang disebut sebagai tingkah laku yang disipliner oleh harapan-harapan dalam masyarakat. Lembaga bisa juga disebut sebagai sistem peranan-peranan. Didalam lembaga itu peranan yang satu berhubungan dengan peranan yang lain, artinya peranan itu tidak berdiri sendiri (Rahardjo, 1979).

2.3.1 Islam Dan Budaya Jawa

Meskipun para ahli sejarah saling berbeda pendapat dalam masalah masuknya Islam ke Indonesia, baik mengenai pembawaannya, jalan yang ditempuh, maupun dari segi waktunya, penyebaran Islam di Jawa telah sempurna pada abad ke-16 M seiring dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak. Sempurna disini dalam arti secara kuantitas sebagian besar penduduk Jawa telah mengaku sebagai orang Islam, sekalipun jumlah terbesar dari mereka juga sebatas pada pengucapan syahadat.

Agama Islam mulai masuk di Pulau Jawa sebelum abad ke-13 M, dan pertama kali menerima pengaruh Islam dari Malaka. Dari Jawa ini kemudian Islam tersebar ke kepulauan Indonesia bagian timur seperti Makasar (Ujung Pandang). Pusat-pusat tertua penyebaran agama Islam saat itu adalah daerah Gresik dan Surabaya. Kesimpulan ini didasarkan pada bukti bahwa di Gresik terdapat banyak makam tua. Diantaranya sebuah makam tua dari seorang yang bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada 7 Rajab 475 H (1082 M) dan makam Malik Ibrahim yang meninggal pada 12 Rabiulawal 822 H (1419 M) (Pigeaud, (1986) dalam Sofwan, (2004)).

Namun, menurut Ma Hua, pelancong muslim dari Cina pada tahun 1415 M di Jawa Timur belum ada orang Islam pribumi dan baru pada tahun 1450 Islam telah mempengaruhi bangsawan-bangsawan kota pesisiran, seperti Tuban, Gresik, dan Sedayu.

Keberhasilan pengislaman penduduk Jawa itu adalah berkat kerja keras para mubalig yang tangguh. Mereka adalah para wali yang terhimpun dalam suatu lembaga dakwah yang terkenal dengan nama Walisongo. Proses Islamisasi ini berjalan dengan damai, nyaris tanpa konflik politik ataupun konflik kultural. Pengislaman di Jawa dimulai dari lapisan masyarakat bawah.

Pengislaman itu terjadi secara damai karena metode yang dipakai oleh para wali dalam berdakwah menggunakan metode yang sangat akomodatif dan lentur, yakni dengan menggunakan unsur-unsur budaya lama (Hinduisme dan Buddhisme), tetapi secara tidak langsung memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam unsur-unsur lama itu.

Didalam buku *Madzhab-Madzhab Antropologi* (Syam, 2007): menyatakan bahwa ada beberapa tulisan yang dapat dikategorikan sebagai kajian yang menempatkan masyarakat Islam dengan corak Islam lokal sebagai fokus pembahasan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Geertz, yaitu *Santri, Priayi, Abangan* dalam masyarakat Jawa. Pada pertengahan tahun 1950-an di Mojokuto, Jawa Timur. Disertasi Geertz ini telah dibukukan dengan judul *The Religion of Java* dan diterbitkan didalam edisi Indonesia sebagaimana judul diatas pada tahun 1981. Tulisan ini sebagaimana judul aslinya memberikan gambaran bahwa masyarakat Jawa memiliki agama sendiri, yaitu agama lokal yang berisi kepercayaan terhadap numerologi, kekuatan gaib, dan berikut tradisi upacara ritualnya yang diidentikkan dengan kepercayaan kaum abangan yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan Jawa. Di sisi lain, juga terdapat kaum *santri* yang memiliki keyakinan “kuat” terhadap Agama Islam dan terbagi menjadi dua, kaum modernis (Muhammadiyah) dan kaum tradisionalis (NU). Masing-masing memiliki keyakinan, tata ritual, dan tradisinya sendiri. Mereka adalah golongan yang diidentikkan dengan dagang, pasar, sedangkan kaum *priayi* banyak berkomunitas dan berpusat di kota. Mereka memiliki keyakinan, tata ritual serta tradisi yang berbeda, dan mereka kebanyakan dipengaruhi oleh tradisi Hindu/Budha. Golongan ini berbeda dengan dua kategori sebelumnya karena mereka adalah *wong alusan*. Penelitian ini menggunakan metode etnografi yang memanfaatkan *thick description* sebagai model pengungkapannya.

Tulisan Greetz banyak memperoleh kritik, terutama model trikotominya yang dirasakan sebagai pemaksaan. Memasukkan priayi berdampingan dengan santri dan abangan adalah kekeliruan konseptual. Santri dan abangan adalah kategori ketaatan beragama, sedangkan priayi adalah kategori sosial. Komentar juga datang dari Hendroprasetyo didalam tulisannya tentang “Mengislamkan Orang Jawa, Antropologi Baru Islam Indonesia”. Menurutnya, cara pandang Greetz seperti itu diilhami oleh cara kaum orientalis dengan memandang berbagai tradisi di masyarakat lokal yang dinyatakan sama sekali tidak Islam. Komentar senada juga dilakukan oleh Nur Syam didalam tulisan tentang “Menelusuri Dinamika Santri dan Perubahan” yang menyatakan bahwa yang sebenarnya disebabkan oleh “kesalahan” konseptualisasi antara abangan dan santri disatu sisi dengan priayi disisi lain.

Memang telah terjadi banyak perubahan didalam memandang dinamika hubungan priayi dan santri. Tulisan Suhartini menggambarkan bagaimana dewasa ini telah terjadi perubahan dengan masuknya kaum priayi menjadi santri. Dengan studinya ini diperoleh suatu temuan bahwa seiring dengan semakin menguatnya posisi Islam baik sebagai *discourse* maupun didalam kekuatan religio-politik, banyak priayi yang kemudian menjadi santri. Perubahan tersebut sekurang-kurangnya dimulai dengan memasukkan anak-anaknya ke pesantren, memanggil guru ngaji atau menciptakan suasana Islam di dalam rumah tangga, misalnya shalat berjama'ah.

2.4 Wilayah Pesisir dan Pantai

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (*intrusi*) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas,

sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (*continental shelf*), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002).

Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang khas seperti, delta, laguna, terumbu karang (*coral reef*), padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (*sand dune*) tercakup dalam wilayah ini. Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung pada struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk tipe-tipe wilayah pesisir tersebut. Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua yang meluas (*trailing edge*) mempunyai konfigurasi yang landai dan luas. Kearah darat dari garis pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke arah laut terdapat benua yang luas. Bagi wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan (*collision edge*), dataran pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan benuanya ke arah laut juga sempit.

Mendasarkan pada batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara daratan dan laut. Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan ekosistem khas yang kaya akan sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*) seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sumberdaya tak dapat pulih (*non rewable resources*) seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki potensi energi kelautan yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), serta memiliki potensi jasa-jasa lingkungan (*environmental*

services) seperti media transpormasi, keindahan alam untuk kegiatan pariwisata, dan lain-lain.

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri *et al*, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Kedua definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.

2.4.1 Karakteristik Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dan proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas.
2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari makan.
3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut.
4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang sempit akan jumpai kondisi ekologi yang berlainan.
5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional.

Kelima karakteristik tersebut bermuara pada tiga keunikan wilayah pesisir, yaitu: (1) Ekosistem pesisir yang sangat kompleks, dinamis dan mudah mengalami kerusakan/rentan (*vulnerable*) apabila dimanfaatkan manusia. (2) Sumber daya menimbulkan konflik. (3) Di perairan pesisir masih terdapat pemahaman regime pengelolaan akses terbuka (*open access*) sehingga yang kuat sering lebih menguasai sumber daya dan membatasi akses masyarakat pesisir dalam memanfaatkannya, sementara regime pengelolaan tradisional (*common property*), pemilikan pribadi/swasta (*quasi-private property*) serta penguasaan pemerintah (*state property*) masih berlaku (DKP, 2005).

2.4.2 Bentuk dan Tipe Geomorfologi Pantai

Wilayah pesisir memiliki beberapa bentuk dan tipe geomorfologi pantai yang sangat bergantung pada letak, kondisi, dan posisi pantai itu seperti pantai terjal, pantai berbatu, pantai berpasir, pantai landai, pantai campuran, pantai dalam, pantai netral, pantai paparan, pantai pulau, pantai tenggelam, dan pantai timbul, sebagai contoh:

- Tipe pantai landai terdapat di pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera dan pantai selatan Kalimantan
- Tipe pantai campuran terdapat di Sulawesi dan kepulauan Indonesia timur
- Tipe pantai terjal terdapat di pantai selatan Jawa dan pantai barat Sumatera
- Pada pulau-pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua), sering terdapat sungai besar yang mengalir ke laut, yang sangat berpengaruh terhadap bentuk dan tipe pantai di sekitarnya serta material yang membentuknya, ada yang membentuk laguna (segara anakan), delta (Delta mahakam) atau gumuk pasir.

Mengingat kondisi wilayah pesisir yang unik dengan berbagai tipe tersebut, maka faktor-faktor yang bekerja di wilayah pesisir seperti angin, gelombang, pasang surut, arus, dan salinitas jauh lebih berfluktuasi daripada di lautan atau perairan darat (sungai dan danau). Besaran (magnitude) faktor tersebut berubah secara berangsur dari arah darat ke laut lepas. Karakteristik geomorfologi dan oseanografi yang sangat dinamis namun rentan terhadap dampak eksploitasi inilah yang mendorong kebutuhan bahwa wilayah pesisir harus dikelola dan diatur pemanfaatannya secara khusus dan hati-hati, baik itu untuk kepentingan produksi (perikanan, pertanian, industri), *coastal engineering*

(dermaga, bangunan pantai) maupun kepentingan pariwisata bahari, dan konservasi (DKP, 2005).

2.4.3 Tipe-tipe Pantai

Pantai merupakan kawasan yang selalu berubah. Perubahan ini disebabkan oleh proses pengendapan dari padatan-padatan yang berada dalam badan air, proses pengikisan (abrasi), dan transportasi sedimen dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perilaku pantai tersebut sangat erat kaitannya dengan parameter lingkungan yang bekerja di wilayah itu, seperti gelombang, arus pantai, pasang surut, maupun angin.

Tipe-tipe Pantai yang ditemui adalah:

1. Pantai Berbatu, pantai ini terbentuk dari batu granit dari berbagai ukuran tempat ombak pecah. Umumnya pantai berbatu terdapat bersama-sama atau berseling dengan pantai berinding batu. Kawasan ini paling padat makroorganismenya, dan mempunyai keragaman fauna maupun flora yang paling besar. Tipe pantai ini banyak ditemui di selatan Jawa, Nusa tenggara dan Maluku.
2. Pantai Berpasir, pantai ini dapat ditemui di daerah yang jauh dari pengaruh sungai besar, atau dipulau kecil yang terpencil. Makroorganisme yang hidup di sini tidak sepadat dikawasan pantai berbatu, dan karena kondisi lingkungannya organisme yang ada cenderung menguburkan dirinya ke dalam substrat. Kawasan ini lebih banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas rekreasi.
3. Pantai Berlumpur, perbedaan antara tipe pantai ini dengan tipe pantai sebelumnya terletak pada ukuran butiran sedimen (substrat). Tipe pantai berlumpur mempunyai ukuran butiran yang paling halus. Pantai berlumpur terbentuk disekitar muara-muara sungai, dan umumnya

berasosiasi dengan estuaria. Tebal endapan lumpurnya dapat mencapai 1 meter atau lebih. Pada pantai berlumpur yang amat lembek sedikit fauna maupun flora yang hidup disana. Perbedaan yang lain adalah gelombang yang tiba di pantai, dimana aktivitas gelombangnya sangat kecil, sedangkan untuk pantai yang lain sebaliknya.

4. Pantai Berkarang, pantai ini terbentuk dari rumah/cangkang yang dibangun oleh hewan laut yang disebut *acropora*, *fungia* dan *porites* (dalam filum *coelenterata*). Ataupun oleh tumbuhan laut yang disebut dengan *halimeda* dan *lithohamnion*. Koloni terumbu karang ini merupakan ekosistem yang khas di daerah tropis (Permana, 2001).

2.5 Ekosistem di Wilayah Pesisir

Dalam suatu wilayah pesisir biasanya terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) pesisir dan sumber daya pesisir. Tipe ekosistem pasir Indonesia dideskripsikan atas dasar komunitas hayati dan penggenangan oleh air (Kartawinata dan Soemodihardjo, 1976; Nontji, 1987). Berdasarkan sifatnya, ekosistem pesisir dapat bersifat alami (*natural*) atau buatan (*manmade*). Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang (*coral reefs*), hutan mangrove (*mangrove forest*), padang lamun (*seagrass beds*), pantai berpasir (*sandy beach*), pantai berbatu (*rock beach*), *formasi pescaprae*, *formasi barringtonia*, estuari, laguna, delta, dan ekosistem pulau kecil. Ekosistem pesisir tersebut ada yang terus-menerus tergenangi air dan ada pula yang hanya sesaat. Sedangkan ekosistem buatan antara lain adalah tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pemukiman.

2.5.1 Ekosistem Pesisir yang Tergenang Air

2.5.1.1 Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang khas terutama untuk daerah tropis. Ekosistem yang “hidup” tersebut merupakan sistem simbiosis yang sangat kompleks dan raksasa antara berbagai organisme penyusun terumbu karang maupun massa kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang (terutama ordo *Scleractinia*). Terumbu karang merupakan kumpulan dari banyak sekali habitat mikro yang saling berhubungan dengan ribuan spesies tumbuhan maupun tanaman sebagai penyusunnya. Menurut (Smith, 1978), sekitar 85% dari terumbu karang dunia berada di kawasan Indo-Pacific dan merupakan salah satu mega biodiversitas yang paling kaya di dunia (Allen, 1996 dalam Diposaptono, 2001).

a. Karakteristik

Meskipun hewan karang (*corals*) ditemukan di seluruh perairan dunia, tetapi hanya di daerah tropis terumbu karang dapat berkembang dengan baik. Terumbu (*reef*) terbentuk dari endapan-endapan masif terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan karang (*filum scnedaria*, kelas *anthozoa*, ordo *madreporaria scleractinia*), alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat (Nybakken, 1986). Hewan karang termasuk kelas *anthozoa*, yang berarti hewan berbentuk bunga (*antho* artinya bunga; yang berarti bunga; *zoa* artinya hewan). Aristoteles mengklasifikasikan hewan karang sebagai hewan-tumbuhan (*animal plant*). Baru pada tahun 1723, hewan karang diklasifikasi sebagai binatang.

Di dunia terdapat dua kelompok karang yaitu karang hermatifik dan karang ahermatifik. Perbedaan kedua kelompok karang ini terletak pada kemampuan karang hermatifik di dalam menghasilkan terumbu (*reef*). Kemampuan menghasilkan terumbu ini disebabkan oleh adanya sel-sel

tumbuhan yang bersimbiosis di dalam jaringan karang hermatifik. Sel-sel tumbuhan ini dinamakan *zooxanthellae*. Selanjutnya distribusi karang hermatifik hanya ditemukan di daerah tropis, sedangkan karang ahermatifik tersebar di seluruh dunia (Dahuri, 2003).

c. Fungsi dan Manfaat Terumbu Karang

Fungsi dan manfaat terumbu karang sangat besar baik yang bersifat lestari maupun yang tidak. Terumbu karang berfungsi sebagai *breeding nursery*, dan *feeding ground* bagi banyak spesies ikan lepas pantai maupun ikan-ikan karang, invertebrata, dan reptilia. Peran terumbu karang dalam melindungi pesisir dari serangan ombak dan abrasi pantai juga sangat penting. Terumbu karang tidak hanya mematahkan energi gelombang melalui gelombang pecah, tetapi juga menjadi sumber suplai material bagi pesisir (*biogenic sediment*). Hilang dan rusaknya terumbu karang hampir selalu diikuti dengan meningkatnya abrasi pantai. Manfaat lestari lainnya antara lain: wisata bahari, mariculture, bioteknologi, ikan hias, kawasan lindung, penelitian dan pendidikan. Manfaat tidak lestari antara lain: penambangan material, cara penangkapan ikan dan pengumpulan organisme yang merusak (penggunaan bom), dan perluasan daratan (reklamasi) (Diposaptono, 2001).

b. Penyebaran Terumbu Karang di Indonesia

Terumbu karang tumbuh di pulau-pulau yang memiliki perairan pantai yang jernih, kadar oksigen tinggi, bebas dari sedimen dan polusi serta limpasan air tawar yang berlebihan. Lebih dari 95% wilayah Indonesia (sekitar 17.500 pulau) dikelilingi oleh terumbu karang. Berdasarkan hubungannya dengan daratan, terumbu karang di Indonesia diklasifikasikan menurut Dahuri, 2003 di bagi dalam tiga kelompok besar sebagai berikut:

1. Terumbu tepi (*fringing reef*) adalah terumbu karang yang berada dekat dan sejajar dengan garis pantai. Contoh tipe terumbu karang yang ada di

daerah Mentawai, Pangandaran dan Parangtritis di pantai selatan P. Jawa, di Lombok dan Sumbawa, di Nusa Tenggara Timur serta di Utara dan Barat Papua.

2. Atol (*atoll*) adalah terumbu tepi yang berbentuk seperti cincin dan di tengahnya terdapat goba (danau) dengan kedalaman mencapai 45 meter. Contoh atol atau terumbu cincin adalah atol Takabonerate di Sulawesi Selatan.
3. Terumbu penghalang (*barrier reef*) serupa dengan karang tepi, dengan pengecualian jarak antara terumbu karang dengan garis pantai atau daratan cukup jauh, dan umumnya dipisahkan oleh perairan oleh perairan yang dalam. Karang penghalang dapat ditemukan di Kep. Togean, Sulawesi Tengah, dan di beberapa tempat di Kalimantan Timur dan di Selat Makasar.

Luas ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia diperkirakan sekitar 85.707 km² yang terdiri dari 50.223 km² terumbu penghalang, 19.540 km² terumbu cincin (atol), 14.542 km² terumbu tepi (Tomascik et. al., 1997 dalam Dahuri, 2003). Luas terumbu karang Indonesia mewakili 18% dari total luas terumbu karang yang ada di dunia.

2.5.1.2 Lamun

Di dasar perairan pesisir tropik yang lebat banyak tumbuh tumbuhan yang lebat rerumputan laut yang merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup berakar dalam dasar laut. Seluruh tumbuhan terendam dalam laut. Sama halnya dengan daratan, lamun membentuk padang-padang lamun yang luas dan lebat di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh sinar matahari dengan tingkat energi cahaya yang memadai bagi pertumbuhannya. Juga sama halnya dengan rumput daratan, lamun tumbuh tegak, berdaun tipis yang bentuknya mirip

pita dan berakar jalar. Tunas-tunas tumbuh dari rizoma, yaitu bagian rumput menjalar di bawah permukaan dasar laut. Berlawanan dengan tumbuhan lain yang hidup dan terendam dalam permukaan laut (misalnya ganggang/alga laut) lamun berbuah dan menghasilkan biji (Permana, 2001).

a. Karakteristik

Lamun (*seagrasses*) adalah tumbuhan berbunga (*angiospermae*) yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut. Tumbuhan ini mempunyai beberapa sifat yang memungkinkannya hidup di lingkungan laut, yaitu: (1) mampu hidup di media air asin, (2) mampu berfungsi normal dalam keadaan terbenam, (3) mempunyai sistem perakaran jangkar yang berkembang baik, (4) mampu melaksanakan penyerbukan dan daur generatif dalam keadaan terbenam (Den Hartog, 1970 dalam Dahuri, 2003). Lamun memiliki perbedaan yang nyata dengan tumbuhan yang hidup terbenam dalam laut lainnya, seperti makro-algae atau rumput laut (*seaweeds*). Tanaman lamun memiliki bunga dan buah yang kemudian berkembang menjadi benih.

Lamun juga memiliki perakaran yang nyata, dedaunan, sistem transportasi internal untuk gas dan nutrisi, serta stomata yang berfungsi dalam pertukaran gas. Akar pada tumbuhan lamun tidak berfungsi penting dalam pengambilan air, karena daun dapat menyerap nutrisi secara langsung dari dalam air laut. Tumbuhan tersebut dapat menyerap nutrisi dan melakukan fiksasi nitrogen melalui tudung akar. Kemudian, untuk menjaga agar tubuhnya tetap mengapung di dalam kolam air, tumbuhan ini dilengkapi dengan ruang udara (Dahuri, 2003).

b. Fungsi Lamun

Adapun fungsi lamun di lingkungan pesisir menurut Permana, 2001 adalah:

1. daun lamun segar merupakan makanan bagi ikan duyung (yang sebenarnya bukan ikan, tetapi hewan menyusui: mamalia), penyu laut,

bulu babi dan beberapa jenis ikan. Padang lamun merupakan daerah perumputan (*grazing ground*) yang penting artinya bagi hewan-hewan laut ini.

2. sistem perakaran lamun yang padat saling menyilang dapat menstabilkan dasar laut dan mengakibatkan kokoh tertanamnya lamun dalam dasar laut. Bahkan lamun tidak mudah tercabut oleh gelombang yang kuat pada waktu badai/topan.
3. padang lamun juga berfungsi sebagai perangkap sedimen yang kemudian diendapkan dan distabilkan.
4. padang lamun merupakan habitat bagi bermacam ikan (pada umumnya ikan berukuran kecil) dan udang.
5. pada permukaan lamun hidup berlimpah ganggang-ganggang renik (biasanya ganggang bersel tunggal) dan hewan-hewan renik serta mikroba, yang merupakan makanan bagi bermacam-macam ikan yang hidup di padang lamun.
6. banyak jenis ikan dan udang yang hidup diperairan sekitar padang lamun menghasilkan larva yang bermigrasi ke padang lamun untuk tumbuh menjadi besar.
7. daun-daun lamun juga berperan sebagai tudung pelindung yang melindungi penghuni padang lamun dari sengatan sinar matahari.

c. Lamun di Indonesia

Lamun yang ditemukan di perairan Indonesia terdiri dari tujuh marga (*genera*). Tiga di antaranya (*Enhalus*, *Thalassia*, dan *Halophila*) termasuk suku *Hydrocaritaceae*, sedangkan empat marga lainnya (*Halodule*, *Cymodoceae*, *Syringodium*, dan *Thalassodeneron*) termasuk suku *Potogetonaceae* (Nontji, 1987 dalam Dahuri, 2003). Zonasi senaran dan karakteristik lamun di perairan pesisir Indonesia dapat dikelompokkan menurut (1) genangan air dan

kedalaman; (2) kualitas air; (3) komposisi jenis; (4) tipe substrat; dan (5) asosiasi dengan sistem lain (seperti terumbu karang, mangrove dan estuari).

Dari 20 jenis lamun yang dijumpai di perairan Asia Tenggara hanya 12 jenis lamun yang dijumpai di perairan Indonesia yaitu *Cymodocea serrulata*, *C. rotundata*, *Enhalus acoroides*, *Halodule uninervis*, *H. Pinifolia*, *Halophila mino*; *H. Ovalis*, *H. Decipiens*, *H. Spinulosa*, *Thalassia hemprichii*, *Syringodium isoetifolium*, dan *Thalassodendron ciliatum*.

Penyebaran padang lamun di Indonesia mencakup perairan Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya. Spesies yang dominan dan dijumpai hampir di seluruh Indonesia adalah *Thalassia hemprichii* (Brouns, 1985; Hutomo *et. al.* 1988). Keanekaragaman hayati lamun yang paling tinggi dapat dijumpai di perairan Teluk Flores dan Lombok, masing-masing ada 11 spesies. Sedangkan menurut Den Hartog (1970), di Indonesia ditemukan 13 jenis lamun. Sebagai tambahan adalah spesies lamun *Hallophila beccari* (Dahuri. 2003).

2.5.1.3 Ekosistem Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah sebutan umum bagi suatu jenis komunitas hayati pantai yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang khas yang mampu tumbuh dan berkembang di perairan payau. Hutan mangrove terdapat di daerah pasang surut pantai berlumpur yang terlindung dari gerakan gelombang dan dimana ada pemasokan air tawar dan partikel-partikel sedimen yang halus melalui aliran air permukaan (Permana, 2001).

a. Karakteristik

Hutan mangrove sering kali disebut dengan hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau. Bakau sebenarnya hanya salah satu jenis tumbuhan yang menyusun hutan mangrove, yaitu jenis *Rhizophora spp.* Dengan demikian,

pemberian istilah hutan bakau dinilai kurang tepat. Oleh sebab itu, ditetapkanlah istilah hutan mangrove sebagai nama baku untuk *mangrove forest*.

Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropika dan subtropika yang khas, tumbuh di sepanjang pantai atau sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindungi dari gempuran ombak dan daerah landai. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Sedangkan di wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai, pertumbuhan vegetasi mangrove tidak optimal. Mangrove tidak atau sulit tumbuh di wilayah pesisir yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut kuat, karena kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur yang diperlukan sebagai substrat bagi pertumbuhannya.

b. Fungsi Mangrove

Menurut Sumarna dan Abdullah, (1993) dalam Panjaitan, R, *et al.* (2003): menyatakan bahwa ekosistem hutan mangrove mempunyai peranan dan fungsi penting yang dapat mendukung kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:

1. Fungsi ekologis sistem hutan mangrove menjamin terpeliharanya:
 - a) Lingkungan fisik, yaitu perlindungan pantai terhadap pengikisan oleh ombak dan angin, pengendapan sedimen, pencegahan dan pengendalian intrusi air laut ke wilayah daratan serta pengendalian dampak pencemaran air laut.
 - b) Lingkungan biota, yaitu sebagai tempat berkembang biak dan berlindung biota perairan seperti ikan, udang, moluska dan berbagai jenis reptil serta jenis-jenis burung serta mamalia.
 - c) Lingkungan hidup daerah di sekitar lokasi (khususnya iklim makro).

2. Fungsi sosial dan ekonomis, yaitu sebagai:

- a) Sumber mata pencaharian dan produksi berbagai jenis hasil hutan dan hasil hutan ikutannya
- b) Tempat rekreasi atau wisata alam
- c) Obyek pendidikan, latihan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Hutan Mangrove di Indonesia

Kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara merupakan pusat penyebaran hutan mangrove dunia. Kawasan ini mewakili 41,5% luas mangrove dunia. Sedangkan Indonesia mewakili 25% dari luas mangrove dunia, dan 75% dari luas mangrove di Asia Tenggara. Sampai saat ini wilayah Indonesia masih diakui sebagai wilayah yang memiliki habitat mangrove terluas di dunia.

Daerah penyebaran mangrove di Indonesia umumnya terdapat di Pantai Timur Sumatera, muara sungai di Kalimantan, pantai selatan dan Tenggara Sulawesi, pulau-pulau di Maluku serta pantai utara dan selatan Irian Jaya. Luas total hutan mangrove di Indonesia pada tahun 1996 adalah 3,5 juta ha (Ditjen Intag, Departemen Kehutanan, 1996). Hutan mangrove terluas terdapat di Irian Jaya, yaitu lebih kurang 1.350.600 ha (38%), kemudian di Kalimantan 978.200 ha (28%), dan Sumatera 673.300 ha (19%).

Ekosistem mangrove di Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman jenis tertinggi di dunia. Sejauh ini di Indonesia tercatat ada 202 jenis tumbuhan mangrove yang terdiri dari 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 19 jenis tumbuhan memanjat (liana), 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis tumbuhan paku. Dari 202 jenis tersebut, hanya 43 jenis yang merupakan mangrove sejati (*true mangrove*). Sementara, tumbuhan mangrove sejati di dunia tercatat ada 60 jenis. Beberapa genera pohon mangrove yang umum dijumpai di pesisir Indonesia adalah bakau (*Rhizophora sp.*), api-api (*Avicennia sp.*), pedada

(*Sonneratia sp.*), tanjang (*Bruguiera sp.*), nyirih (*Xylocarpus sp.*), tengar (*Ceriops sp.*), dan buta-butua (*Exoecaria sp.*).

2.5.1.4 Estuari

Estuari adalah perairan pesisir semi-tertutup (*semi-enclosed*) dengan hubungan terbuka dengan laut; dengan demikian estuari sangat dipengaruhi gerakan pasang surut muka laut, sedangkan air estuari merupakan campuran air tawar yang masuk ke estuari melalui drainase dari daratan, biasanya melalui sungai (Permana, 2001).

a. Karakteristik

Bentuk estuari bervariasi dan sangat tergantung pada besar kecilnya aliran sungai, kisaran pasang-surut dan bentuk garis pantai. Estuari dari sungai yang besar dapat memodifikasi garis pantai dan topografi sublittoral melalui pengendapan dan erosi sedimen, sehingga garis pantai bergerak menjorok beberapa kilometer ke arah laut (Meadows dan Campbell, 1988). Kebanyakan estuari didominasi oleh substrat lumpur yang berasal dari endapan yang dibawa oleh air tawar maupun air laut. Karena partikel yang mengendap kebanyakan bersifat organik, substrat dasar estuari biasanya kaya akan bahan organik. Bahan organik inilah yang menjadi cadangan makanan utama bagi organisme estuari (Dahuri, 2003).

b. Klasifikasi Estuari

1. Estuari berstratifikasi nyata atau estuaria baji garam, yang dicirikan oleh adanya batas yang jelas antara air tawar dan air asin. Estuaria ini banyak ditemukan di daerah dimana aliran air tawar dari daratan (biasanya melalui sungai besar) lebih dominan ketimbang penyusupan (*intrusi*) air asin dari laut yang dipengaruhi oleh pasang surut.

2. Estuaria campuran sempurna atau estuaria homogen vertikal, banyak dipengaruhi oleh pasang surut sehingga tercampur sempurna dan tidak terdapat stratifikasi.
3. Estuaria berstratifikasi sebagian/parsial atau estuaria berstratifikasi moderat. Paling umum dijumpai, biasanya aliran air tawar seimbang dengan masuknya air laut lewat arus pasang. Percampuran air terutama oleh karena adanya aksi pasang surut secara terus-menerus, dan akan tercipta pola lapisan air dan massa air yang kompleks.

c. Biota Estuari

Hewan air yang hidup di estuari menurut Permana (2001), terdiri dari:

1. spesies-spesies yang endemik (hampir seluruh hidupnya ada di estuaria) seperti bermacam-macam karang, kepiting dan ikan.
2. spesies-spesies yang hanya tinggal untuk sementara waktu di estuaria seperti larva beberapa spesies udang dan ikan yang setelah menjadi dewasa seksual bermigrasi kelaut bebas.
3. beberapa spesies ikan menggunakan estuaria sebagai jalur migrasi dari laut ke sungai dan sebaliknya seperti sidat dan ikan salmon.

d. Estuari di Indonesia

Indonesia memiliki banyak sungai yang umumnya dijumpai di beberapa pulau besar. Secara intensif ekosistem estuari terbentuk di bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS), akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan luasnya daratan yang landai di daerah pesisir, seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Irian Jaya.

2.5.1.5 Rumput Laut

a. Karakteristik

Rumput laut (*seaweeds*) atau alga makro tumbuh di perairan laut yang memiliki substrat keras dan kokoh yang berfungsi sebagai tempat melekat. Tumbuhan rumput laut ini hanya dapat hidup di perairan apabila cukup mendapatkan cahaya. Pada perairan yang jernih, rumput laut dapat tumbuh hingga kedalaman 20-30 meter. Nutrien tersebut dihantarkan melalui mekanisme upwelling, turbulensi, dan masukan dari daratan.

b. Rumput Laut di Indonesia

Jenis-jenis rumput laut yang terdapat di Indonesia adalah *Euchema*, *Hypnea*, *Gracilaria*, *Gelidium*, *Sargassum*, dan *Turbinaria* sudah dibudidayakan, terutama di pulau Riau, Lampung, kepulauan Seribu, Bali, Lombok, Flores, Sumba, dan Sulawesi.

Rumput laut yang memiliki nilai ekonomi telah dibudidayakan oleh masyarakat di tempat-tempat yang kondisi arusnya relatif tenang, sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi lahan yang relatif besar untuk pengembangan produksi rumput laut (≥ 500 ha) adalah Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya.

2.5.2 Ekosistem Pesisir yang Tidak Tergenangi Air

Ekosistem pesisir yang tidak tergenangi air (*uninundated coast*) menurut Dahuri (2003), terdiri dari dua formasi: yaitu Formasi *Pescaprae* dan Formasi *Barangtonia*.

1. Formasi *Pescaprae*

Ekosistem ini umumnya terdapat di belakang pantai berpasir. Formasi *pescaprae* (gosong pantai berpasir) didominasi oleh vegetasi pionir, khususnya kangkung laut (*Ipomoea pescaprae*).

2. Formasi *Baringtonia*

Ekosistem ini berkembang di pantai berbatu tanpa deposit pasir di mana formasi *pescaprae* tidak dapat tumbuh. Habitat berbatu ini ditumbuhi oleh komunitas rerumputan dan belukar yang dikenal sebagai formasi *Baringtonia*. Komposisi komunitas ini sangat seragam di seluruh Indonesia. Meskipun komunitas ini terdiri dari berbagai macam spesies rerumputan dan semak belukar, namun beberapa jenis pepohonan, seperti cemara laut (*Casuarina equisetifol*) dan *Callophyllum innophyllum* dapat mendominasi spesies tumbuhan lainnya.

2.6 Teologi Lingkungan Menurut Islam

Hukum Islam (syari'at) adalah suatu sistem nilai. Syari'ah itu ada untuk mewujudkan nilai-nilai yang melekat dalam konsep kunci Islam seperti tauhid, khilafah, istishlah, halal dan haram. Tujuan tertinggi dari sistem ini adalah kesejahteraan kita di alam akhirat nanti. Namun yang menjadi tujuan universal syariat adalah kesejahteraan umum bagi seorang muslim, pengalaman syariat ini menjadi sesuatu yang khas karena mempunyai implikasi penting yang berakar dari konsep Tauhid. Orang hanya dapat mematuhi satu pencipta dari segala kehidupan dengan jalan bekerja demi kesejahteraan umum yang universal bagi kesejahteraan makhluk.

Syariat mengutamakan keselamatan bagi semua makhluk yang eksis di atas bumi, tidak terkecuali makhluk hidup berupa jamur, yang menempel di pohon yang lapuk, mikro organisme yang tidak kasat mata, lalu pada kutu hingga

gajah-berhak mendapatkan perhatian manusia agar mereka dapat mempelajarinya.

“Dan pada penciptaan kamu dan binatang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini (Q. s. Al-Jatsiyah” (45):4)

Yang Maha Pencipta membuat bumi dan segala isinya dengan suatu tujuan agar manusia dapat menjalankan ibadah dengan sempurna. Adalah naif bila dalam menjalankan segala aktivitas di bumi tidak dikontrol oleh aturan dari penciptaannya. Juga mustahil manusia mengolah bumi tanpa ada suatu kerangka yang membatasi mereka memanfaatkan sumber daya di bumi. Maka kerangka-kerangka inilah yang dapat digunakan untuk menampilkan pengelolaan Sumberdaya Alam yang beradab.

a. Tauhid

Kerangka yang sangat penting dalam tindakan seorang muslim adalah keyakinannya kepada kemahatunggalan Allah. Tauhidlah yang mengajarkan kepada kita kepasrahan tawakal secara total setelah mengadakan usaha yang maksimal dan telah bertekad secara sungguh-sungguh (Q.s. 3:159). Sedangkan lawan dari tauhid adalah musyrik atau mempersekutukan Allah yaitu membuat suatu tandingan atau meyakini kekuatan lain selain hukum Allah (Al-Qur'an). Maka Tuhan Yang Maha Penyayang sangat tegas menolak segala bentuk kemusyrikan mempersekutukan Dia dengan yang lain:

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, barang siapa yang

dikehendakiNya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (Q.s. an-Nisa (4): 48).

Memahami ketauhidan berarti memberikan penghargaan kepada ciptaanNya. Bahwasanya Allah Maha Tunggal telah memberikan perintah-perintah prinsip melalui wahyu agar manusia tetap hidup selamat dan sejahtera di bumi dan mendapatkan keselamatan pula di akhirat.

Pengetahuan terhadap tauhid ini menjadikan manusia bertanggung jawab karena ilmu yang diperolehnya mempunyai bingkai (kerangka) amanah. Dengan sendirinya secara praktis dalam wawasan tauhid pula manusia dapat menjalankan disiplin-disiplin hukum Allah. Manusia bekerja dengan tujuan mencapai pemenuhan terhadap garis-garis fitrah yang telah dirumuskan Allah dalam kitab wahyunya. Karena itulah Al-Qur'an merupakan rahmat yang besar yang dapat dijadikan prinsip dalam menata bumi karena fitrah Al-Qur'an adalah mengatur tatanan hidup di bumi:

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”(Q. s. Ad-Dukham, (44): 38,39)

Jika manusia mempersekutukan Allah dengan tidak memegang prinsip tauhidnya, berarti telah terjadi suatu pelanggaran. Maka Allah akan membinasakan mereka akibat dosa dan kesalahan mereka sendiri, betapapun kenikmatan yang

telah mereka peroleh, akhirnya pasti akan berakhir dengan kehancuran dan kebinasaan.

“Apakah mereka tidak memperhatikan berupa banyak generasi-generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan padamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan kami jadikan sungai mengalir di bawah mereka karena dosa mereka sendiri dan kami jadikan sesudah mereka generasi yang lain.”(Q. s. Al-An’am, (6): 6)

b. Kepemimpinan (Khilafah)

Kepemimpinan atau khilafah, merupakan sarana penting dalam merumuskan teori lingkungan Islam. Khilafah dapat bermakna, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang mempunyai kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya. Prinsip khilafah merupakan isu sentral yang dapat bermuara pada tiap individu dalam mengambil kebijakan terhadap lingkungannya. Dapat saja manusia yang tidak mempunyai kebijakan dan keterikatan dengan tanggung jawab tertentu dengan sesuka hatinya merumuskan pemanfaatan dan memboroskan Sumberdaya Alam serta mencemari lingkungannya.

Ketegasan dalam pelaksanaan kearifan hukum syariat ini yang menjadi landasan menegakkan keseimbangan dan keadilan terhadap segala makhluk yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya. Ketika manusia diwariskan kepemimpinan

maka wajiblah mereka mampu untuk berbuat keadilan dan menegakkan syariat yang adil untuk semua makhluk.

Dalam Islam, imam (khilafah/pimpinan) mempunyai peran penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk di dalamnya memperhatikan pembagian dan pengelolaan sumber daya alam. Khalifah Umar Ibn Khatab misalnya, sering mencontohkan pembagian sumber daya sehingga tidak mengakibatkan kecemburuan sosial dalam penggunaan sumber daya tersebut.

Umar Ibn Khatab adalah Khalifah kedua yang mencontohkan bahwa sumber daya alam itu merupakan amanah yang seharusnya dikelola dengan adil dan mengutamakan orang-orang miskin dan lemah. Sebagai mana Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kami supaya menunaikan amanat kepada yang empunya (berhak), dan apabila kamu menghukum manusia maka hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.s. an-Nisa (4): 58)

Dalam ayat lain, ditegaskan mengenai pembebanan amanat yang sepenuhnya ternyata hanya dapat dipikul oleh manusia. Sebelumnya, bumi, langit, dan gunung tidak mampu dan enggan memikul amanah itu. Maka manusialah yang telah sanggup diamanahkan oleh Allah di bumi dan mengelolanya. Firman Allah SWT:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”(Q.s. alAhzab (33): 72)

Kekhalifahan adalah amanah, maka seseorang pemimpin dapat diberikan amanah jika ia mampu menegakkan keadilan di muka bumi. Yaitu kerangka keadilan syariat Islam. Sedangkan hukum Islam tersebut bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qias.

Maka khalifah merupakan pilar penting yang dapat membawa perbaikan lingkungan. Seorang yang diberikan tanggung jawab sebagai khalifah haruslah bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan di bumi.

c. Kemaslahatan umum (Al-Istishlah)

Kemaslahatan umum (al-istishlah) atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Visi yang diberikan Islam terhadap lingkungan termasuk usaha memperbaiki (islah) terhadap kehidupan manusia. Kepentingan itu bukan hanya untuk hari ini namun juga untuk masa yang akan datang yaitu 20, 30, 50 bahkan berabad-abad berikutnya. Allah menyediakan alam dan isinya yang harmonis sejalan dengan keseimbangan ekosistem yang telah terjadi secara alamiah. Manusia dilarang untuk merusak anugrah ini sesuai dengan firman-Nya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdo’alah kepadaNya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(Q.s. AZ-A’raf, (7): 56)

Menurut hipotesis Lovelock (1979) bumi merupakan makhluk hidup yang disebut sebagai Gaia. Bumi dapat menjadi sakit atau tidak dapat memulihkan seperti semula apabila terjadi pengurasan SDA yang melebihi kemampuan lingkungan untuk pulih kembali. Bumi dan ekosistemnya mempunyai sifat awal yaitu mampu memperbaiki diri kembali lingkungannya itulah yang perlu dirumuskan sehingga ada perhitungan bahwa ada pemanfaatan SDA kita tetap mampu mempertahankan sifat bumi yang dapat menjalankan fungsi homeostasisnya.

Berlebih-lebihan dalam menguras SDA merupakan penyebab utama terjadinya bencana, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah:

“Dan janganlah menuruti perintah orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”(Q.s. Asy-su’aara (26): 151-152)

Kemaslahatan umum merupakan suatu ketentuan syariat bahwa sebagai pemimpin (khalifah) di bumi, Rasulullah SAW telah mencontohkan suri tauladan untuk memperbaiki dan memberikan perlindungan terhadap semua umat, termasuk kemaslahatan makhluk hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada disekitarnya. Kerangka inilah yang mendasari bahwa kehadiran Islam ke dunia tidak lain merupakan rahmat bagi seluruh alam.

d. Halal dan Haram

Konsep kunci Islam yang paling dipahami masyarakat muslim adalah peraturan-peraturan mengenai halal (yang dibolehkan) atau legal dan haram yang dilarang atau ilegal. Kedua istilah ini menjadi suatu pembatas yang sangat kuat untuk mencegah perilaku manusia agar tidak merusak tatanan yang teratur dalam ekosistem dan tata kehidupan masyarakat.

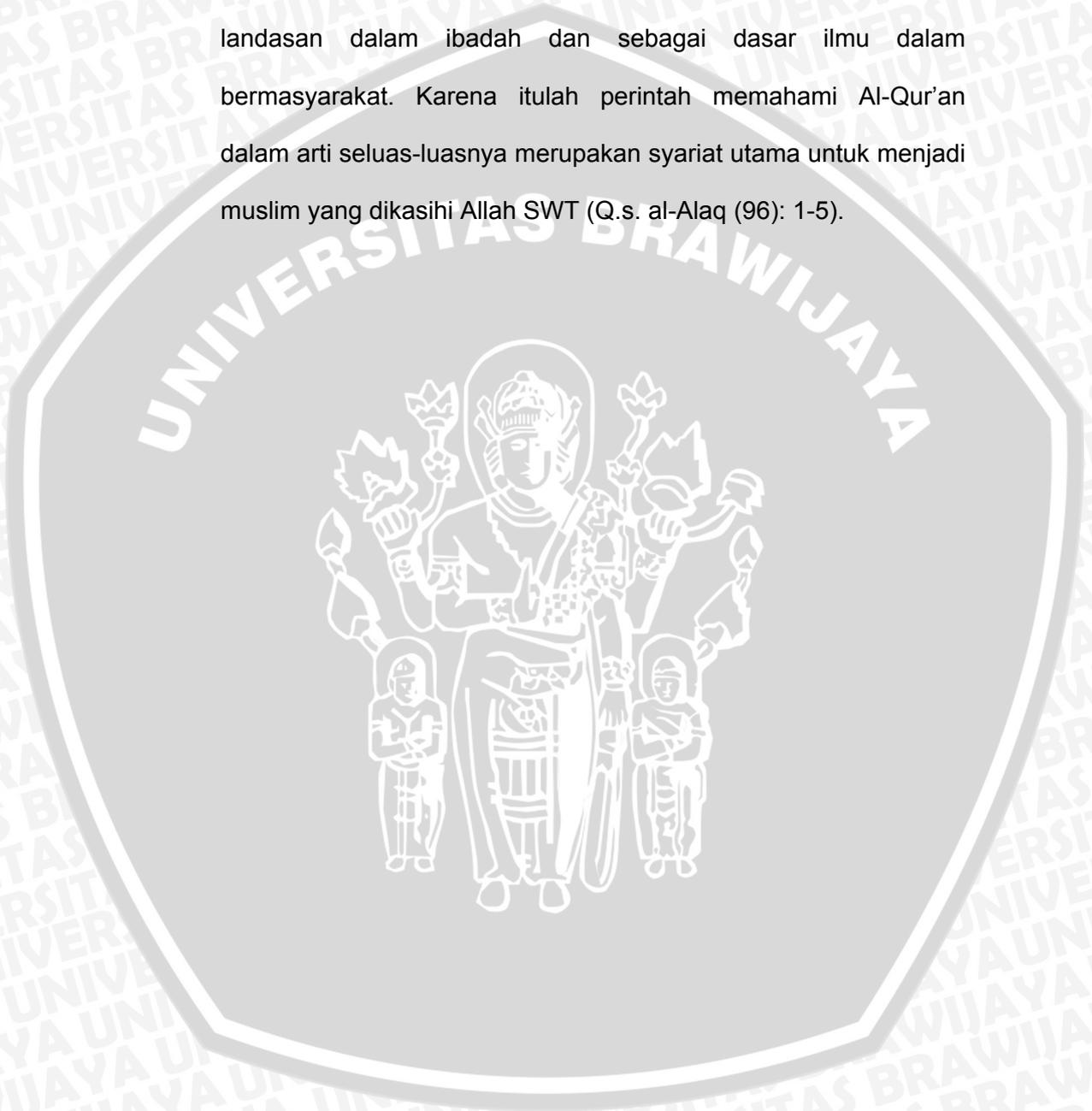
Syariat membolehkan untuk melakukan sesuatu atas sadar perintah dan melarang sesuatu karena adanya larangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, Allah berfirman:

"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung."(Q.s. al-A'raaf (7): 157)

Kerangka halal dan haram ini merupakan bentuk aplikasi syariat yang juga harus ditegakkan dalam pelaksanaannya sebagaimana hukum positif membutuhkan penegak hukum (*law enforcement*).

Namun dalam masyarakat Islam, sosialisasi hendaknya dipahami dan dikuasai oleh segala lapisan masyarakat. Sebab, sosialisasi merupakan salah satu bagian dari ibadah dalam

keseluruhan hidup manusia. Al-Qur'an adalah sumber syariat yang tidak putus-putusnya dibaca bahkan dihafalkan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat Islam, syariat tidak hanya dipahami oleh praktisi hukum tetapi juga harus disadari sebagai landasan dalam ibadah dan sebagai dasar ilmu dalam bermasyarakat. Karena itulah perintah memahami Al-Qur'an dalam arti seluas-luasnya merupakan syariat utama untuk menjadi muslim yang dikasihi Allah SWT (Q.s. al-Alaq (96): 1-5).



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar Jawa Timur, penelitian dilaksanakan pada bulan januari 2009.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 3 metode, yang pertama adalah survey dan studi kasus (*case study*) digunakan untuk menjawab tujuan 1 dan 2 yaitu mengetahui alasan yang mendasari masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) dalam merusak sumberdaya pesisir dan mengetahui pengetahuan, pemahaman dan dukungan masyarakat (nelayan dan pedagang ikan) terhadap peraturan pemerintah dan pemahaman Al-Qur'an tentang menjaga lingkungan wilayah pesisir. Lalu metode yang ke-3 adalah *Content Analysis* (Analisis isi) untuk menjawab tujuan ke-3 yaitu mengetahui konsistensi isu-isu lingkungan pada pengelolaan lingkungan wilayah pesisir yang terdapat pada Undang-Undang, dan relevansi dengan isu-isu lingkungan yang ada di Kitab Suci Al-Qur'an.

3.3 Survey

Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Hal yang sangat penting bagi peneliti ialah adanya minat untuk mengetahui masalah sosial atau fenomena sosial tertentu. Minat tersebut dapat timbul dan berkembang karena rangsangan bacaan, diskusi, seminar atau pengamatan, atau campuran semuanya itu (Singarimbun dan Effendi, 2008).

3.3.1 Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Survey

Langkah-langkah yang lazim ditempuh dalam pelaksanaan survey menurut Singarimbun dan Effendi (2008), sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survey.
2. Menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan. Adakalanya hipotesa tidak diperlukan, misalnya pada penelitian operasional.
3. Pengambilan sampel.
4. Pembuatan kuesioner.
5. Pekerjaan lapangan, termasuk memilih dan melatih pewawancara.
6. Pengolahan data.
7. Analisa dan pelaporan.

Ciri khas penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner.

3.3.2 Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan antara *populasi sampling* dengan *populasi sasaran*. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara "Sampel Acak *Distratifikasi*", yaitu pemilihan sampel populasi yang tidak homogen. Makin heterogen suatu populasi, makin besar pula perbedaan sifat antara lapisan-lapisan tersebut. Presisi dan hasil yang dapat dicapai dengan menggunakan suatu metode pengambilan sampel, antara lain dipengaruhi oleh derajat keseragaman populasi yang bersangkutan.

Untuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat populasi yang heterogen, maka populasi yang bersangkutan harus dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan (*strata*) yang seragam, dan dari setiap lapisan dapat diambil

sampel secara acak. Dalam sampel berlapis, peluang untuk terpilih antara satu *strata* dengan yang lain mungkin sama, mungkin pula berbeda (Singarimbun dan Effendi, 2008).

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden (Singarimbun dan Effendi, 2008).

Di dalam penelitian ini populasi keseluruhan adalah 86 orang; yang memakai alat tangkap payang ada 6 kapal dan memakai sekoci ada 36, jumlah kuesioner adalah 18 orang dan pengambilan sampel dilakukan oleh nelayan dan pedagang ikan di Desa Tambakrejo.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan.

Skala likert digunakan untuk mengukur persepsi perilaku masyarakat wilayah pesisir di kawasan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar terhadap bentuk dari perilaku masyarakat terhadap lingkungan wilayah pesisir.

3.3.3 Variabel Penelitian

Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Setelah mengemukakan beberapa proporsi berdasarkan konsep dan teori tertentu, peneliti perlu menentukan variabel-variabel penelitian dan selanjutnya

merumuskan hipotesa berdasarkan hubungan antar variabel. Fenomena sosial dapat dijelaskan dan diramalkan apabila hubungan antar variabel tertentu telah diketahui. Penentuan variabel penelitian yang dapat diukur dan dirumuskan hubungan antara variabel adalah dua langkah yang sangat penting dalam penelitian sosial (Singarimbun dan Effendi, 2008).

Pemilihan variabel pada penelitian ini menggunakan variabel “hubungan Timbal Balik”, yaitu hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. Perlu diketahui bahwa hubungan timbal balik bukanlah hubungan, di mana tidak dapat ditentukan variabel yang menjadi sebab dan variabel yang menjadi akibat. Yang dimaksudkan ialah apabila pada suatu waktu, variabel X mempengaruhi variabel Y, pada waktu lainnya variabel Y mempengaruhi X. Sebagai contoh, penanaman modal mendatangkan keuntungan dan pada gilirannya keuntungan akan memungkinkan penanaman modal. Dengan demikian, variabel pengaruh pada waktu lain.

3.3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut dia akan mengetahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan. Dengan demikian dia dapat menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru (Singarimbun dan Effendi, 2008).

3.3.5 Regresi Linier Berganda

Pada dasarnya regresi linier berganda adalah untuk mengukur besarnya perubahan variabel dependent Y sehubungan dengan perubahan variabel

independent X. Penggunaan regresi linier berganda di karenakan variabel X lebih dari satu.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independent terhadap varianel dependent (Sugiyanto dalam Wahyuni, 2007).

Menurut Sugianto dalam Wahyuni (2007), persamaan umum regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + e$$

Dimana:

Y = subyek dalam variabel dependent yang diprediksikan (tak bebas)

x = variabel bebas (1, 2, ... n)

a = intersep (nilai Y pada saat X sama dengan nol)

b = koefisien regresi

e = variabel pengganggu (error)

Model regresi linier berganda tersebut kemudian dirumuskan dengan memasukkan variabel-variabel yang akan diteliti:

Dalam Surat Ar - Rum Ayat 41;

Artinya: *"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia: Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar kembali (kejalan yang benar)."*

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + e$$

Dimana:

Y = variabel tergantung (kerusakan lingkungan)

x1 = pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang

x2 = pengetahuan masyarakat terhadap Agama

x3 = alasan /motivasi masyarakat merusak lingkungan

e = variabel pengganggu

3.4 Studi Kasus (*Case Study*)

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena *kontemporer* (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2008).

3.4.1 Identifikasi *Stakeholder*

Identifikasi *stakeholder* adalah suatu kegiatan mengenali dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kerusakan apa saja yang terjadi di wilayah pesisir pantai tambakrejo (COREMAP, 2001).

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari masyarakat Desa Tambakrejo. Secara sederhana *stakeholder* sering dinyatakan sebagai pihak, lintas pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana (KAI, 2003). Dijelaskan lebih lanjut bahwa *stakeholder* adalah suatu individu atau kelompok atau unsur masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu wilayah atau sumberdaya yang terdapat dalam suatu wilayah yang akan mengalami dampak yang bersumber pada perubahan keputusan dalam penggunaan dan konservasi wilayah atau sumberdaya yang terdapat dalam suatu wilayah tersebut diatas.

Penentuan *stakeholder* dalam hal ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa *stakeholder* tersebut berkaitan langsung dengan pembuatan peraturan atau hukum pemerintah dan agama serta yang berkaitan langsung dalam perusakan lingkungan masyarakat pesisir.

Adapun didalam menentukan *Stakeholder* pada penelitian ini adalah:

1. Lembaga Pemerintah

a) Pemerintah Desa Tambakrejo

Responden adalah kepala desa yang mengetahui keadaan masyarakat, penerapan hukum dalam masyarakat dan perusakan lingkungan yang terjadi dalam masyarakat di desa tersebut.

b) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar

Pemerintah daerah berperan dalam setiap keputusan pengambilan kebijakan karena otonomi daerah memberikan kesempatan pada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Hal tersebut juga terjadi pada Kabupaten Blitar.

c) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Blitar

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mempunyai wewenang atas kebijakan yang diambil pada lingkungan masyarakat pesisir.

d) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Kapedal) Kabupaten Blitar

Kapedal disini berkepentingan sebagai lembaga yang menangani masalah kerusakan lingkungan termasuk lingkungan laut.

2. Lembaga non Pemerintah

a) Tokoh Agama di Masyarakat Desa Tambakrejo

Tokoh agama yang dimaksud adalah orang yang dipandang oleh masyarakat lebih memahami agama Islam.

b) Masyarakat nelayan di Desa Tambakrejo

Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan 300 Jiwa, yang berpengaruh besar terhadap lingkungan wilayah pesisir.

3.4.2 Proses Studi Kasus

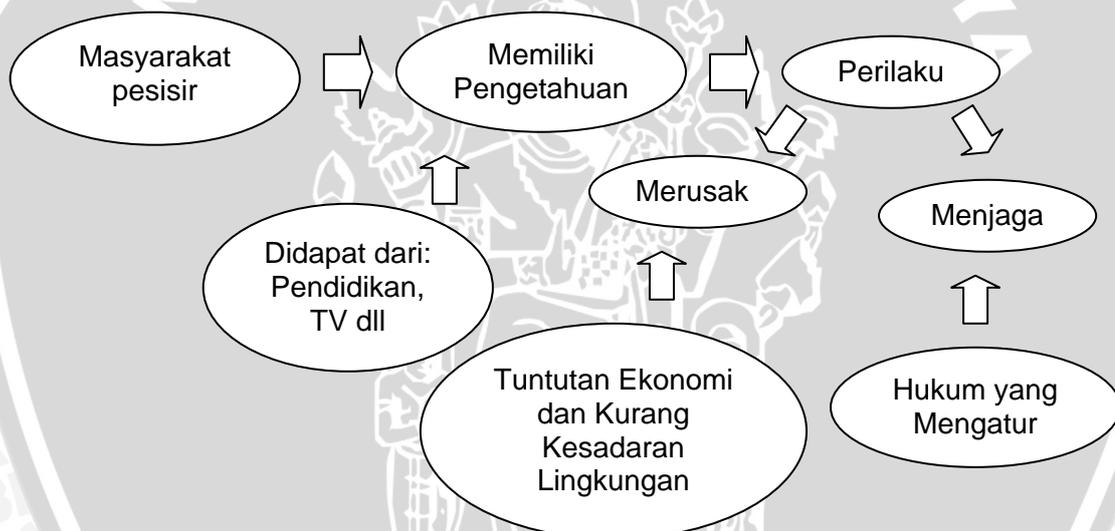
Untuk studi kasus, ada lima komponen desain penelitian yang sangat penting, yaitu:

- 1) Pertanyaan-pertanyaan penelitian: strategi studi kasus merupakan strategi yang paling cocok untuk pertanyaan-pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, sehingga tugas pertama-tama membuat pertanyaan yang disesuaikan dengan kasus dalam penelitian anda.
- 2) Proporsinya: setiap proposisi mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya.
- 3) Unit-unit analisisnya: secara fundamental berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan “kasus” dalam penelitian yang bersangkutan, suatu problema yang telah mengganggu banyak peneliti di awal studi kasusnya.
- 4) Logika yang mengaitkan data dengan proporsi dan kriteria untuk menginterpretasi temuannya: komponen ini mengetengahkan tahap-tahap analisis data dalam penelitian studi kasus, dan desain penelitian perlu meletakkan dasar-dasar bagi analisis ini. Pengaitan data terhadap proposisi dapat dilakukan dengan banyak cara, tetapi tidak satu pun yang telah terdefiniskan dengan tepat.

3.4.3 Kata Kunci yang akan ditanya

1. Apa Bapak/Ibu mengetahui adanya peraturan dari Pemerintah untuk tidak merusak wilayah pesisir?
2. Apa Bapak/Ibu juga mengetahui adanya pelarangan di dalam Agama untuk tidak merusak lingkungan terutama wilayah pesisir?
3. Dimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi peraturan untuk tidak merusak wilayah pesisir tersebut?
4. Bagaimana sikap Bapak/Ibu apabila ada masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan?

3.4.4 Bagan Analisa Desain



Gambar 1. Alur Perilaku masyarakat pesisir yang kurang menyadari lingkungan

3.5 Content Analysis (Analisis isi)

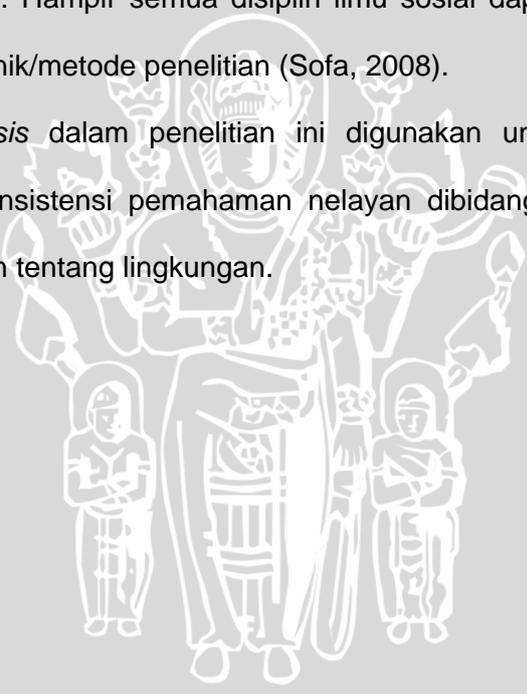
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan *Content Analysis* (Analisis isi). Deskripsi kualitatif merupakan analisa data dimana data disajikan dengan menggambarkan secara jelas keadaan yang sebenarnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji apakah hubungan yang diamati memang betul terjadi karena adanya hubungan

sistematis antara variabel-variabel yang diteliti atau hanya terjadi secara kebetulan.

Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau bercetak dalam media massa. Pelopor analisis ia adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Sofa, 2008).

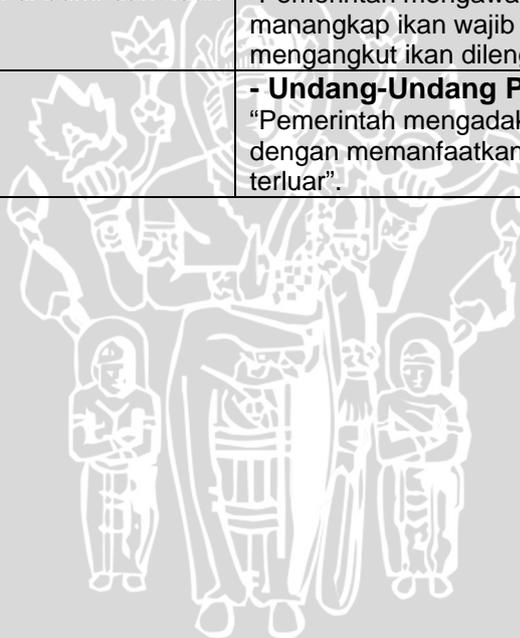
Analisis dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian (Sofa, 2008).

Content Analysis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa tujuan ketiga yaitu konsistensi pemahaman nelayan dibidang Agama dengan hukum dalam Al-Qur'an tentang lingkungan.



Menganalisis hubungan antara Al-Qur'an dengan Hukum Undang-undang dengan matriks sebagai berikut:

Al-Qur'an	Hukum
<p>- Q.s. Ar-Rum (30): 41 Artinya: "Agar manusia berlaku ramah lingkungan dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi".</p>	<p>- Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan (Pasal 23): "Pemerintah melakukan pengawasan dengan melihat pengendalian dampak lingkungan suatu wilayah pesisir tersebut".</p>
<p>- Q.s. Al-A'raf (7): 56 Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan".</p>	<p>- Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 5): "Pemerintah melakukan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari".</p>
<p>- Q.s. Asy-Su'ara (26): 152 Artinya: "Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengalami perbaikan".</p>	<p>- Undang-Undang Perikanan (Pasal 31): "Pemerintah mengawasi jalannya menangkap ikan wajib dilengkapi SIPI dan mengangkut ikan dilengkapi SIKPI".</p>
	<p>- Undang-Undang Pesisir (Pasal 27): "Pemerintah mengadakan perencanaan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar".</p>



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Geografis dan Topografis

Dalam catatan sejarah yang ada, Kabupaten Blitar sejak dahulu telah tercatat sebagai kawasan yang strategis dan penuh dengan dinamika dalam perkembangannya, yang secara geografis terletak pada $111^{\circ} 40' - 112^{\circ} 10'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 58' - 8^{\circ} 9' 51''$ Lintang Selatan.

Adapun batas-batas Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Kab. Malang dan Kab. Kediri
- Sebelah Timur : Berbatasan Kab. Malang
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Berbatasan Kab. Tulungagung dan Kab. Kediri

Kabupaten Blitar dibagi menjadi 22 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan dengan rincian adalah 220 dengan status Desa serta 28 dengan status Kelurahan. Sedangkan jumlah dusun/lingkungan pada tahun 2004 tercatat sebanyak 759. Kecamatan Sutojayan merupakan Kecamatan terluas, dengan luas wilayah sebesar $164,54 \text{ km}^2$, sedangkan Kecamatan Sanankulon merupakan Kecamatan yang memiliki luas terkecil sebesar $33,33 \text{ km}^2$.

Sedangkan Kecamatan Wonotirto merupakan gabungan dari beberapa Desa dari Kecamatan Bakung di Sutojayan. Bentuk wilayahnya merupakan daratan rendah sampai berombak. Kecamatan ini terdiri dari 8 Desa dengan 1 Desa pantai yaitu Desa Tambakrejo, jumlah penduduk 38,908 jiwa yang terdiri dari 19,155 jiwa penduduk laki-laki dan 19,753 jiwa penduduk perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 336 jiwa/km^2 .

batas-batas Kecamatan Wonotirto adalah:

- Barat : Kecamatan Bakung dan Kecamatan Kademangan
- Utara : Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Kademangan
- Timur : Kecamatan Panggungrejo
- Selatan : Samudera Indonesia

Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian \pm 167 meter dan luas wilayahnya 1.588,77 km². di Kabupaten Blitar terdapat sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua bagian yaitu: Kawasan Blitar Utara dengan luas 898,94 km² dan Kawasan Blitar Selatan dengan luas 689,85 km².

Dibandingkan dengan kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan berbatu, yang mana batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Namun demikian, kawasan Blitar Selatan merupakan bagian integral dari kawasan Selatan Jawa Timur (KSJT) yang merupakan wilayah penting, potensial dan prospektif. Dilihat dari potensi alam, lingkungan, dan kulturalnya, secara umum kawasan Blitar Selatan sesungguhnya cukup kaya dan menjanjikan.

4.1.2 Potensi Sumber daya Manusia

Potensi sumber daya manusia di Desa Tambakrejo dapat dilihat melalui data jumlah penduduk yang terbagi dalam jumlah penduduk berdasarkan jenis

kelamin, umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan agama. Dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk Desa Tambakrejo pada tahun 2005; adalah 4465 jiwa, perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan tidak terlampau jauh. Penduduk laki-laki 2180 jiwa (48,82%) dan penduduk perempuan 2285 jiwa (51,17%). Jadi terdapat perbedaan sebanyak 105 jiwa antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

➤ **Umur**

Jumlah penduduk berdasarkan umur pada tahun 2005; dapat dikategorikan menjadi 6 (enam), yaitu usia 00 – 03 tahun sebanyak 739 jiwa (16,55%), usia 04 – 06 tahun sebanyak 699 jiwa (15,65%), 07 – 12 tahun sebanyak 891 jiwa (19,95%), usia 13 – 15 tahun sebanyak 496 jiwa (11,10%), usia 16 – 18 tahun sebanyak 294 jiwa (6,58%) dan usia produktif 19 – keatas tahun sebanyak 1346 jiwa (30,14%).

Selengkapnya mengenai data penduduk Desa Tambakrejo berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Tambakrejo Berdasarkan Umur Pada Tahun 2005

No	Umur	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	00 – 03 tahun	739	16,55%
2	04 – 06 tahun	699	15,65%
3	07 – 12 tahun	891	19,95%
4	13 – 15 tahun	496	11,10%
5	16 – 18 tahun	294	6,58%
6	19 - keatas	1346	30,14%
	Total	4465	

Sumber: Kantor Desa Tambakrejo, 2005

➤ Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Tambakrejo dapat dikatakan masih rendah, hal ini terlihat dari mayoritas penduduk yang tingkat pendidikannya sebatas lulus Sekolah Dasar dan yang sampai Perguruan Tinggi (Universitas) hanya berjumlah 2 orang.

Sarana Pendidikan formal di Desa Tambakrejo dapat dikatakan sangat rendah, disana terdapat 3 (tiga) buah Sekolah Dasar Negeri, 2 (dua) buah Madrasah Swasta, 1 (satu) buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta. Karena kurangnya sarana pendidikan di Desa Tambakrejo ini kebanyakan Orangtua yang sudah memiliki anak melanjutkan pendidikan hanya sebatas Sekolah, tetapi ada juga para Orangtua tidak menginginkan pergaulan anaknya buruk sehingga keputusan yang sering diambil oleh para orangtua adalah memasukkan anak-anak ke Pondok Pesantren.

Adapun data mengenai jumlah penduduk Desa Tambakrejo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Tambakrejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Taman Kanak-Kanak	196	10,43%
2	Sekolah Dasar	1136	60,45%
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	329	17,50%
4	Sekolah Menengah Umum	216	11,49%
5	Akademi/ D1 – D3	-	-
6	Sarjana (S1 – S2)	2	0,10%

Sumber: Kantor Desa Tambakrejo, 2005

➤ Mata Pencaharian

Mata pencaharian di Desa Tambakrejo dapat dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah 42 jiwa (3,55%), ABRI adalah 1 jiwa (0,08%), Swasta adalah 5 jiwa

(0,42%), Wiraswasta/pedagang adalah 19 jiwa (1,60%), Tani adalah 95 jiwa (8,03%), Buruh Tani adalah 681 jiwa (57,61%), Pertukangan adalah 36 jiwa (3,29%), Pensiunan adalah 3 jiwa (0,25%) dan Nelayan adalah 300 jiwa (25,38%). Dari hasil data tersebut dapat dilihat bermata pencaharian Buruh Tani lebih besar karena masyarakat Desa Tambakrejo berperekonomian menengah kebawah walaupun ada yang menengah keatas tapi itu hanya sebagian kecil saja, sehingga kebanyakan menjadi Buruh Tani di samping menjadi pedagang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Pegawai Negri Sipil	42	3,55%
2	ABRI	1	0,08%
3	Swasta	5	0,42%
4	Wiraswasta/Pedagang	19	1,60%
5	Tani	95	8,03%
6	Buruh Tani	681	57,61%
7	Pertukangan	36	3,29%
8	Pensiunan	3	0,25%
9	Nelayan	300	25,38%

Sumber: Kantor Desa Tambakrejo, 2005

➤ Agama

Sebagian besar penduduk Desa Tambakrejo beragama Islam, yaitu sebanyak 4453 jiwa. Sisanya beragama Kristen sebanyak 12 jiwa. Melihat keadaan yang mayoritas beragama Islam tidak heran apabila kebiasaan penduduk yang kental dengan budaya Islami, seperti seringnya mengadakan pengajian-pengajian di setiap RT. Penduduk di Desa tambakrejo seimbang antara kebaikan dan keburukan, selain kebaikan yang ditampakkan di Desa ini

tampak juga keburukan seperti seringnya mabuk-mabukan yang dilakukan oleh para pemuda. Jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Tambakrejo berdasarkan Agama Pada Tahun 2005

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Islam	4453	99,73%
2	Kristen	12	0,26%
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Sumber: Kantor Desa Tambakrejo, 2005

4.2 Keadaan Umum Lokasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Dari hasil laporan status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, secara garis besar potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Blitar meliputi:

1. Pesisir dan Laut

Wilayah Kabupaten Blitar berbatasan dengan Laut Indonesia di sebelah Selatan atau wilayah pesisir lautan, yang berdasarkan lokasinya memiliki gugusan karang serta keanekaragaman biota laut.

Kondisi wilayah Selatan Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah yang berupa daerah perbukitan, Pegunungan Kapur dan daratan rendah yaitu Pantai. Wilayah pantai yang terdapat di Kabupaten Blitar meliputi 4 lokasi yaitu Pantai Jolosutro di Desa Ringinrejo Kecamatan Wates, Pantai Pasur di Desa Bululawang Kecamatan Bakung, Pantai serang di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo di Desa Tambakrejo Kecamatan wonotirto.

Panjang pantai wilayah Kabupaten Blitar $\pm 114,87$ km, yang terdiri dari pantai dengan tebing yang curam dan terjal serta pantai yang landai. Daerah pesisir wilayah Kabupaten Blitar berhadapan langsung dengan Samudera

Indonesia, sehingga secara tidak langsung memiliki arus yang cukup besar.

Wilayah Kabupaten Blitar yang berada di daerah pesisir meliputi:

- Wilayah Kecamatan Bakung dengan Desa pantai yang terdiri dari Desa Bululawang Sidomulyo dan Desa Tumpakepuh
- Wilayah Kecamatan Wonotirto dengan Desa pantai yang terdiri dari Desa Kalirengeng, Desa Tambakrejo, Desa Gununggede dan Desa Ngadipuro
- Kecamatan Panggungrejo dengan Desa pantai yang terdiri dari Desa Serang dan Desa Summersih
- Kecamatan Wates dengan Desa pantai yang terdiri dari Desa Tulungrejo, Desa Ringinrejo dan Desa Tugurejo.

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pesisir di Kabupaten Blitar ini adalah berupa potensi penangkapan dan budidaya hasil laut yang sampai saat ini belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Beberapa faktor penghambat belum optimalnya pemanfaatan kekayaan laut wilayah Kabupaten Blitar dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa hal, yaitu:

- a. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil laut, dalam hal ini menyangkut keterbatasan modal, keterbatasan ketrampilan dan peralatan penangkapan serta rendahnya penerapan teknologi penangkapan di kalangan masyarakat nelayan.
- b. Akibat keterbatasan tersebut, berpengaruh terhadap daya jangkau penangkapan yang terbatas hanya pada perairan dangkal saja, sedangkan untuk kegiatan penangkapan hingga perairan dalam, hanya dilakukan oleh nelayan bermodal besar atau nelayan dari luar wilayah Kabupaten Blitar.
- c. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung pengembangan perikanan laut, seperti PPI (Pusat Pelelangan Ikan), Pabrik Es (Cold

storage), pengolahan ikan, dan perahu-perahu modern beserta peralatan tangkap untuk mendukung penangkapan ikan.

- d. Kesiapan masyarakat untuk bersaing dengan nelayan lainnya masih kurang akibat keterbatasan sarana dan prasarana tangkap yang dimiliki.
- e. Akibat adanya keterbatasan di atas, maka dikhawatirkan pada masa yang akan datang potensi kelautan wilayah Kabupaten Blitar belum mampu memberikan andil yang besar dalam memberikan pemasukan bagi wilayah Kabupaten Blitar.

2. Perikanan

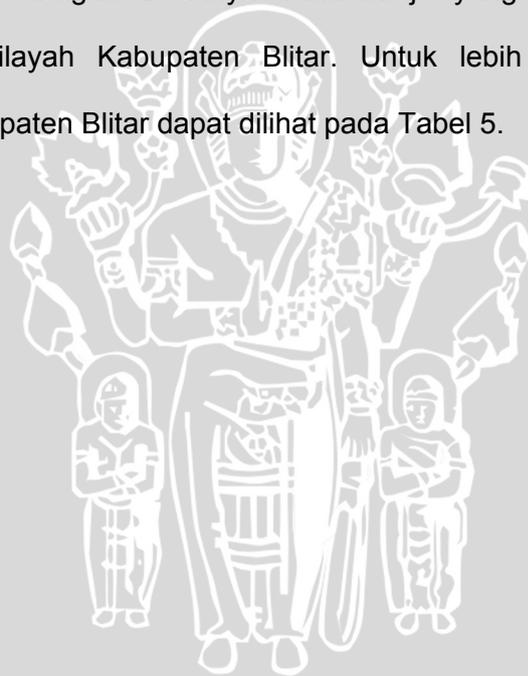
Perikanan di Kabupaten Blitar dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu perikanan darat dan perikanan laut, mengingat Kabupaten Blitar mempunyai wilayah pesisir (bagian selatan). Adapun potensi perikanan tersebut adalah:

- a. perikanan darat, antara lain berupa kolam pekarangan, mina padi, sungai, waduk, tambak dan jaring apung.
- b. Perikanan laut, antara lain ialah:
 - Usaha penangkapan ikan di laut
 - Usaha penangkapan ikan dan restocking di perairan umum
 - Usaha perikanan di bidang pasca panen yaitu pengolahan ikan

Kabupaten Blitar mempunyai garis pantai sepanjang 45 km, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar mempunyai potensi perikanan yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dimasa yang akan datang. Sebenarnya untuk Kabupaten Blitar bagian selatan dapat dikembangkan sebagai kawasan perikanan laut karena berbatasan langsung dengan samudera Indonesia, namun karena kurangnya fasilitas penunjang seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan aksesibilitasnya maka nelayan akan kesulitan dalam melabuhkan hasil tangkapannya sehingga pada umumnya nelayan akan menuju ke pelabuhan ikan

di pantai Sendang Biru Kabupaten Malang ataupun di Pantai Poppoh Kabupaten Tulungagung. Pelabuhan ikan yang ada di Kabupaten Blitar masih bersifat tradisional, sehingga tidak cukup untuk menampung hasil tangkapan ikan para nelayan. Terdapat 2 (dua) lokasi di Kabupaten Blitar yang memiliki potensi untuk dibangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yaitu Pantai Tambakrejo di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto dan Pantai Serit di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo. Jenis ikan laut yang dihasilkan di Kabupaten Blitar adalah tongkol, lemuru, udang dan layang.

Kecamatan yang mempunyai potensi yang cukup banyak adalah Kecamatan Wonotirto dengan Desanya Tambakrejo yang merupakan desa penghasil ikan di wilayah Kabupaten Blitar. Untuk lebih jelasnya potensi perikanan laut di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 5.



Tabel 5. Produksi Ikan Laut Menurut Jenis Ikan Tahun 2002 - 2006

No	Jenis Ikan	2002	2003	2004	2005	2006
1	Merah/Bambangan	506	20.580	-	3.588	
2	Tongkol	44.680	322.557	730.624	86.591	291.356
3	Cucut	2.100	3.160	10.225	8.380	24.120
4	Tengiri	-	20.400	26.250	-	4.241
5	Pari	732	140	2.160	3.210	20.543
6	Selar	3.540	-	-	-	-
7	Lemuru	4.209	5.580	2.575	4.550	13.476
8	Udang	45.400	105.000	-	-	-
9	Kerapu	5.808	46.000	119.000	-	4.390
10	Kakap	-	-	88.000	-	-
11	Kembung	-	-	11.700	-	-
12	Banyar	-	-	-	600	-
13	Tetangkek	1.400	-	-	-	-
14	Layang	110.390	3.520	22.790	8.940	163.128
15	Selangsang	-	-	-	-	-
16	Cumi-cumi	-	-	3.600	-	-
17	Lainnya	4.783	-	19.350	450	-
18	Udang Barong	-	-	-	8.493	9.210

Sumber: Kabupaten Blitar, 2007

Nb: tidak ada satuan didalam produksi ikan

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2002 – 2006 penangkapan ikan paling besar pada tahun 2004 dengan jumlah hasil tangkapan ikan adalah 1036274 dan penangkapan ikan paling rendah pada tahun 2005 dengan jumlah hasil tangkapan adalah 124802.

4.3 Keadaan Wilayah Pesisir Kabupaten Blitar

Masyarakat perikanan adalah masyarakat yang secara keseluruhan bergerak disektor perikanan. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki unit usaha dibidang penangkapan, budidaya ikan, pengelolaan ikan,

perdagangan ikan dan pekerjaan perikanan (tidak memiliki unit usaha tetapi bekerja pada unit usaha perikanan).

Komunitas terbesar yang bertempat tinggal dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya ikan di wilayah pesisir Tambakrejo adalah nelayan, yang secara domisili dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu nelayan setempat/nelayan lokal yaitu nelayan yang merupakan penduduk asli Tambakrejo dan nelayan andon yaitu nelayan dari daerah lain. Kedatangan nelayan andon ke wilayah pesisir Tambakrejo umumnya karena inisiatif sendiri untuk menyusul keluarganya yang sudah terlebih dulu tinggal di Tambakrejo atau karena ajakan keluarganya tersebut.

Sedangkan dari segi struktural, masyarakat nelayan disini dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan, mulai dari tingkat paling bawah, yaitu: nelayan biasa, nelayan yang terampil (nakhoda atau ahli mesin), pemilik kapal dan paling atas pedagang besar atau juragan.

Dilihat dari struktur diatas, dapatlah kita bayangkan kondisi kehidupan masing-masing tingkatan masyarakat nelayan tersebut. Nelayan biasa yang menduduki tingkatan paling bawah, adalah kelompok yang paling menderita hidupnya, karena tidak memiliki ketrampilan dan modal yang cukup untuk memperoleh posisi tawar dalam menghadapi tekanan dan eksploitasi tingkatan kelompok nelayan yang ada di Desa Tambakrejo sendiri.

4.4 Kerusakan Lingkungan yang Terjadi di Wilayah Pesisir

4.4.1 Jenis Kerusakan

Kerusakan yang sangat tampak jelas di wilayah pesisir Pantai Tambakrejo karena disebabkan akibat dari:

- Rusaknya ekosistem wilayah pesisir yang mengakibatkan terumbu karang dan ekosistem diperairan rusak sebagai salah satu akibat yang

ditimbulkan dari adanya penggunaan alat tangkap kompresor. Kompresor yang digunakan oleh nelayan untuk mendapatkan lobster dan memiliki sistem kerja yang dapat merusak ekosistem terumbu karang karena sistem dari kompresor tersebut ketika menyedot paksa lobster yang bersembunyi diantara terumbu karang sehingga menyebabkan pertumbuhan karang terganggu/rusak diperairan tersebut.

- Pembangunan pelabuhan yang berada dekat PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) yang mengakibatkan habitat ikan, dampak negatif dari pembangunan pelabuhan salah satunya adalah berkurangnya jenis ikan yang biasa hidup di perairan pergi karena pembangunan pelabuhan yang mengganggu perkembangbiakan ikan tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya kapal-kapal yang berlabuh dapat menyebabkan pencemaran wilayah karena kapal-kapal tersebut melakukan aktivitas seperti pembuangan sisa dari bahan bakar/dari pembersihan kapal. Adapun dampak positif yang ditimbulkan oleh pembangunan pelabuhan diantaranya dapat menambah penghasilan daerah dan semakin banyaknya kapal-kapal yang berlabuh sehingga mengakibatkan ikan dari hasil tangkapan berlimpah dan jenisnyapun beragam.
- Kurangnya kesadaran masyarakat setempat didalam menjaga ekosistem perairan khususnya hutan mangrove yang berperan sangat penting didalam suatu perairan, apabila tidak dijaga kelestariannya dapat menyebabkan abrasi pantai yang terjadi di suatu perairan tersebut. Hal ini mempengaruhi keadaan pantai yang sangat besar didalam suatu perairan dan juga keanekaragaman hayati didalamnya yang saling keterkaitan satu sama lain.

Maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai manusia menjaga lingkungan terutama wilayah pesisir. Pentingnya setiap masyarakat setempat

terutama bagi nelayan mengetahui dan memahami isi dari hukum-hukum yang mengatur didalam penjagaan wilayah pesisir, bukan saja mengetahui dan memahami tetapi juga ikut serta didalam menjaga wilayah pesisir agar kekayaan sumberdaya wilayah pesisir tidak mengalami kepunahan.

4.4.2 Penyebab Kerusakan

Berdasarkan penelitian, penyebab kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir Pantai Tambakrejo disebabkan antara lain:

1. Faktor Alam

- Penumpukan sampah-sampah berupa ranting pohon di pinggir pantai ketika musim penghujan tiba diakibatkan karena faktor alam. Dapat di lihat pada gambar 2.



Gambar 2. Sampah yang berserakan di pinggir pantai ketika hari hujan datang

Penumpukan sampah-sampah berupa ranting pohon yang mengganggu pemandangan disekitar pantai dapat menurunkan kualitas sektor pariwisata di Pantai Tambakrejo, walaupun hal ini disebabkan karena faktor alam. Bagi pemerintah terkait dapat segera menanggulangi masalah lingkungan tersebut agar lebih diperhatikan dengan lebih baik lagi

dan menyadarkan masyarakat agar saling bekerjasama didalam menjaga lingkungan wilayah pesisir.

2. Aktivitas Manusia

- Pengerukan pasir, yang di lakukan oleh masyarakat dapat menyebabkan penyempitan kawasan wilayah pesisir Pantai Tambakrejo itu sendiri. Dapat di lihat pada gambar 3.



Gambar 3. Pengerukan pasir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tambakrejo

Manusia tidak menyadari kalau semakin lama pasir yang diambil di tepi Pantai akan mengakibatkan penyempitan wilayah pesisir dan negara yang bersebelahan dengan negara Indonesia akan mengalami pelebaran wilayah daratan karena negara tetangga membeli pasir di wilayah Indonesia. Itu adalah cara agar wilayah daratan negara tetangga menjadi lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Bagi masyarakat yang kurang memahami hal ini, dapat menjadi celah bagi negara lain untuk dimanfaatkan sehingga diharapkan bagi pemerintah agar memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas penggalian pasir.

- Pembangunan pelabuhan yang akan dibangun didekat Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI), tapi untuk sementara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Blitar sendiri belum meneliti lebih jauh tentang dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan dari Pelabuhan tersebut.

4.5 Alasan yang Mendasari Nelayan Merusak Sumberdaya Pesisir

4.5.1 Faktor Ekonomi yang Mendasari Nelayan Merusak Sumberdaya Pesisir

Faktor ekonomi yang mendasari nelayan merusak sumberdaya pesisir, antara lain:

- Menurut penuturan dari Bu Andjari selaku SubBagian Bina Program Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Blitar, mengatakan:

"Nelayan lebih memilih mendapatkan uang yang banyak dari pada menjaga lingkungan wilayah pesisir untuk menghasilkan pendapatan lebih besar"

Nelayan lebih memilih melakukan penangkapan hasil laut menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena pendapatan nelayan yang kurang sehingga menimbulkan kerusakan yang tanpa disadari oleh para nelayan mengakibatkan rusaknya ekosistem sumberdaya hasil laut. Selain melaut sebagian besar nelayan bekerja sebagai petani, walaupun demikian hasil yang didapat tidak sebanding dengan harga-harga barang sekarang yang sangat mahal.

Maka peran pemerintah disini sangat berperan didalam memberikan penyuluhan bukan hanya memberikan penyuluhan saja tetapi membuat agar masyarakat faham tentang pentingnya menjaga lingkungan wilayah pesisir. Selain itu juga pemerintah diharapkan memberikan ketrampilan yang dapat

berguna bagi masyarakat untuk menambah penghasilan bagi masyarakat setempat.

- Menurut penuturan dari Sekretaris Desa Tambakrejo Bapak Boiman, mengatakan bahwa:

"Tingkat perekonomian yang kurang mapan/rendah sehingga dapat menimbulkan kerusakan yang disebabkan oleh nelayan wilayah pesisir itu sendiri"

Tingkat perekonomian yang kurang mapan/rendah karena rendahnya tingkat pendidikan nelayan, sehingga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari mengakibatkan nelayan tidak menyadari telah melakukan kerusakan di lingkungan wilayah pesisirnya. Sifat dasar nelayan yang boros didalam membelanjakan kebutuhan sehari-hari yang tidak dipikirkan penting tidaknya barang tersebut dibeli sehingga menyebabkan pengeluaran yang banyak, hal tersebut mengakibatkan tidak adanya simpanan/tabungan untuk kehidupan yang akan datang hal ini juga harus di pahami karena tingkat pendidikan rendah oleh sebagian besar para nelayan. Oleh karena itu diharapkan agar generasi penerus setelahnya memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan.

- Menurut penuturan dari Bapak Ajib Santoso selaku Bagian Pemerintahan Kecamatan Wonotirto, mengatakan bahwa:

"Ada sebagian nelayan karena masalah ekonomi melakukan penangkapan di wilayah pesisir lain sehingga bertemu dengan nelayan asli di daerah tersebut dan dapat menyebabkan kres/ berantem antar nelayan karena dianggapnya nelayan pendatang itu ingin mengambil daerah kawasan wilayah penangkapan nelayan asli"

Masalah ekonomi yang mendesak nelayan melakukan penangkapan di daerah wilayah pesisir lain juga menjadi salah satu tuntutan dalam hidup, karena semakin mahalnya kebutuhan pokok dalam hal ini makanan, pendidikan mau tidak mau harus dipenuhi oleh kepala rumah tangga. Apabila nelayan melakukan penangkapan di daerah wilayah pesisir lainnya, ditakutkan hal

tersebut dapat menyebabkan hubungan antara nelayan wilayah pesisir yang satu dengan yang wilayah pesisir lainnya akan berdampak tidak baik karena nelayan pendatang yang dirasa melakukan penangkapan di wilayah pesisirnya mengambil daerah kekuasaan nelayan asli.

Maka diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi bagi masyarakat setempat untuk membuka lapangan pekerjaan tambahan bagi masyarakat, misalnya pengalihan fungsi dari penangkapan ke arah budidaya karena kita tahu hasil tangkapan nelayan dari tahun ketahun semakin menurun karena telah terjadi overfishing (pengambilan yang melampaui batas) sedangkan kegiatan budidaya laut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan karena kebutuhan ikan yang terus meningkat sedangkan hasil dari penangkapan terus menurun. Sehingga diharapkan perekonomian di daerah tersebut dapat stabil dan berjalan dengan baik serta masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan tersebut tanpa harus mencari penghasilan tambahan ke wilayah pesisir lain.

4.5.2 Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Wilayah Pesisir

Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir di Desa Tambakrejo, antara lain:

- Menurut penuturan Bu Andjari selaku SubBagian Bina Program Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Blitar, mengatakan:

"Memakai alat kompresor dengan cara menyelam ke dasar laut, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) sendiri telah melarang agar menyelam ke dalam pada waktu siang hari karena biasanya lobster tidak keluar pada waktu siang tapi yang ditakutkan nelayan mencari ikan pada malam hari. Selain itu juga ditakutkan kalau nelayan memakai potas di wilayah pesisir lainnya untuk meracuni ikan"

Pemakaian kompresor dan alat-alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya laut di Desa Tambakrejo kini sangat memprihatinkan hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran didalam penjagaan lingkungan wilayah

pesisir dari nelayan karena tingkat pendidikan sebagian besar nelayan sangat rendah, sehingga dapat mengakibatkan kurang dapat mengendalikan penangkapan yang ramah lingkungan didalam pengambilan hasil laut yang berlebihan.

Penyebab terjadinya hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap ekosistem laut dari pemerintah terkait, peran dari pemerintah selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama nelayan setempat tentang pelarangan pemakaian kompresor dan penggunaan potas di perairan diharapkan pemerintah juga dapat melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas masyarakat /membuat sistem keamanan berupa dibuatnya polisi pantai. Sehingga diharapkan agar pengawasan dengan cara tersebut dapat mengurangi kerusakan ekosistem perairan wilayah pesisir khususnya terumbu karang.

Perilaku sistem sosial yang cenderung terus menerus mengeksploitasi sistem ekologi (ekosistem) untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, telah menghasilkan perubahan keseimbangan yang terjadi dalam ekosistem. Eksploitasi terhadap lahan telah menyebabkan berubahnya interaksi komponen lahan dengan air, udara, tanaman, hewan dan lain sebagainya. Eksploitasi manusia terhadap tanaman telah menyebabkan perubahan interaksi terhadap hewan, air, lahan, dan sebagainya.

Perilaku-perilaku sosial ini kemudian memaksa manusia untuk beradaptasi dengan sistem ekologinya (ekosistem). Karena dalam kenyataannya, perilaku manusia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan hidup dimana mereka tinggal (Utami, U. 2008).

Masih dari Utami, U (2008); Sumberdaya alam lain yang perlu mendapat perhatian adalah ikan. Ikan bernilai ekonomis tinggi, baik yang hidup di

perairan air tawar maupun laut. Untuk menjaga kelestariannya, seharusnya ada batas ukuran minimal yang boleh ditangkap nelayan dan pencari ikan. Dengan cara ini regenerasi ikan akan berjalan normal (tidak ada stagnasi), yang pada akhirnya akan menjamin pendapatan nelayan secara berkelanjutan. Selain itu, seharusnya nelayan tidak melakukan pengeboman, peracunan atau penubaan, dan penggunaan aliran listrik (penyetruman) untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan dengan cara ini juga mematikan berbagai jenis biota lainnya, yang sebetulnya tidak diperlukan nelayan.

- Menurut penuturan dari Bapak M, selaku nelayan yang biasa mencari lobster di Pantai Tambakrejo, mengatakan:

"Biasanya saya mencari lobster menyelam ke laut dan menggunakan kompresor"

Masalah nelayan yang masih nakal banyak ditemukan di Desa Tambakrejo, meskipun tidak semua nelayan yang melakukan hal tersebut. Walaupun sudah diberi peringatan tegas dari pemerintah terkait tetapi sebagian nelayan tetap saja melakukan penangkapan yang tidak ramah lingkungan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman nelayan dari peraturan Undang-Undang lingkungan wilayah pesisir. Faktor yang paling penting adalah menyampaikan kepada masyarakat terutama kepada nelayan tentang kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem perairan terutama terumbu karang, diharapkan agar nelayan dapat mengetahui dan menyadari betapa sangat besar manfaatnya menjaga ekosistem perairan untuk masa yang akan datang.

- Kegiatan wisata dan adanya sampah rumah tangga dari pemukiman penduduk dan kegiatan perdagangan yang di Desa Tambakrejo mengakibatkan terjadi penimbunan sampah karena kurang perhatian dari pemerintah terkait yang belum dapat menangani secara maksimal tentang kebersihan lingkungan yang terjadi disekitar wilayah pesisir pantai Tambak serta belum tampak kebersamaan antara masyarakat didalam menjaga lingkungan wilayah

pesisirnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika salah satu penduduk menggali pasir yang gunanya untuk menimbun sampah-sampah rumah tangga. Dapat di lihat pada gambar 4.



Gambar 4. Tampak timbunan sampah yang akan digali ke dalam pasir

Tampak dari seorang Bapak yang sedang beristirahat di bawah pohon karena telah melakukan penggalian pasir di pantai yang digunakan untuk menimbun sampah-sampah rumah tangga dan sampah berupa daun-daun kering dari pohon disekitar pinggir pantai yang dirasa mengganggu pemandangan pantai serta kurangnya pemahaman tentang dampak yang terjadi apabila melakukan aktivitas menimbun sampah didalam pasir didekat pantai, dan tidak adanya penyediaan fasilitas dari Dinas Kebersihan untuk tempat pembuangan sampah terakhir di Desa Tambakrejo.

- Kurangnya kesadaran masyarakat yang memperhatikan pentingnya hutan mangrove didalam keseimbangan ekosistem di kawasan wilayah pesisir pantai dan dapat juga mencegah dampak dari terjangan ombak laut yang besar sebagai pemecah ombak. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa bibit mangrove untuk ditanam di wilayah pantai Tambak, dan masyarakat telah

bersama-sama menanam beberapa pohon mangrove yang diberikan oleh pemerintah tetapi bibit-bibit mangrove ini tidak bisa tumbuh dan berkembang besar dengan baik di wilayah pesisir Pantai Tambakrejo.

Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh jarak antara penanaman bibit mangrove berdekatan dengan rumah penduduk yang membuang limbah rumah tangga ke arah aliran tempat dimana bibit-bibit mangrove tumbuh, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekosistemnya. Sebaiknya didalam kegiatan penanaman seperti ini harusnya mendapatkan pengawasan yang serius dari pemerintah terkait dan kesadaran dari masyarakat agar tidak membuang limbah secara sembarangan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit mangrove tidak sia-sia dan penjagaan ekosistem disekitar pantai dapat menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Beberapa pohon mangrove yang telah ditanam oleh masyarakat Desa Tambakrejo

- Kondisi sifat /watak dari nelayan yang pada dasarnya keras juga karena nelayan yang masih muda mengenal minum-minuman keras sehingga dari sifatnya yang keras serta pengaruh dari alkohol yang ada di minuman keras

menambah masalah di Desa Tambakrejo karena dari kebiasaan nelayan yang masih muda tersebut mengakibatkan terjadinya tawuran antar nelayan.

Perilaku atau aktivitas pada individu atau organisasi tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Perilaku individu dapat mempengaruhi individu itu sendiri, di samping itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Demikian pula lingkungan dapat mempengaruhi individu, demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam perspektif psikologi, perilaku manusia (*human behaviour*) dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks (Bandura, 1977; Azwar, 2003).

Didalam Tutik, T. *et al* (2008): Konsep kunci Islam yang paling dipahami masyarakat muslim adalah peraturan-peraturan mengenai halal (yang dibolehkan) atau legal dan haram yang dilarang atau ilegal. Kedua istilah ini menjadi suatu pembatas yang sangat kuat untuk mencegah perilaku manusia agar tidak merusak tatanan yang teratur dalam ekosistem dan tata kehidupan masyarakat.

Syariat membolehkan untuk melakukan sesuatu atas sadar perintah dan melarang sesuatu karena adanya larangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, Allah berfirman:

"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti

cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(Q.s. al-A'raaf (7): 157)

Kondisi dari masyarakat setempat inilah yang dapat menyebabkan sifat semaunya didalam bertindak melakukan aktivitas penangkapan hasil laut yang tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan apabila melakukan penangkapan yang berlebihan. Sebaiknya pemerintah bersikap lebih tegas didalam menegakkan hukum perundang-undangan lingkungan wilayah pesisir agar hukum yang berlaku dapat berjalan dengan semestinya dan nelayan takut untuk merusak ekosistem wilayah pesisir.

- Menurut penuturan dari Bapak Boiman selaku Sekretaris Desa Tambakrejo, mengatakan bahwa:

”Bidang pendidikan maraknya permainan Play Station (PS), yang menyerang anak-anak di bawah umur. Adanya pengaduan wali dari orangtua yang mengeluhkan ke Kantor Desa, lalu Kepala Desa memanggil pemilik rental Play Station (PS) dengan maksud untuk tidak membuka rental pada saat jam sekolah agar anak-anak di bawah umur tidak bermain pada saat jam sekolah. Pemilik rental hanya mengatakan kepada Kepala Desa tergantung kepada orangtua anak itu sendiri apakah benar-benar di perhatikan atau dilepas begitu saja atau diawasi secara benar. Setelah tidak ada tindak lanjut dari pemilik rental, Kantor Desa sendiri melaporkan ke Kapolsek dan Kapolsek sendiri hanya bilang kasus ini akan dikoordinasi kepada atasan, sampai sekarang tidak ada tindak lanjut lebih jelas lagi dari Kapolsek”

Walaupun masalah Play Station (PS) ini masalah dianggap sederhana tapi secara tidak langsung masalah ini menjadi permasalahan yang serius bagi Kantor Desa Tambakrejo. Meskipun demikian sempat menjadi perhatian dari wali orangtua yang anaknya sering bermain Play Station (PS) dan Kantor Kepala Desa Tambakrejo dalam menyikapi masalah tersebut. Untuk ke depannya di harapkan agar antara pemilik rental dan orangtua wali serta Bapak Kepala Desa Tambakrejo dapat bersama-sama bekerjasama dalam membangun generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif dan inovatif.

- Desakan ekonomi yang kecil/kurang mapan, mengakibatkan kurangnya perhatian dari masyarakat terutama nelayan dan pedagang untuk

memperhatikan lingkungan wilayah pesisir dengan baik karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurang pengetahuan serta pemahaman terhadap Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tentang pentingnya menjaga lingkungan wilayah pesisir. Sehingga apapun akan dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh sebab itu sebagai manusia yang dibekali akal pikiran sebaiknya menyadari dan mengetahui mana yang baik dan buruk didalam melakukan segala sesuatu.

- Menurut penuturan Bu Lgrh selaku pedagang ikan di Desa Tambakrejo, mengatakan bahwa:

"walaupun dia merusak tapi sebagai manusia harus saling tenggang rasa"

Sebagai manusia kita harus mempunyai sikap saling tenggang rasa, tapi menyikapi masalah perusakan lingkungan wilayah pesisir pemerintah dan masyarakat setempat harus bekerjasama dalam pemeliharaan karena apabila tidak adanya kerjasama antar penduduk setempat maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah juga harus lebih bersikap tegas lagi dalam menyikapi permasalahan tersebut agar masyarakat yang melakukan perusakan tidak mengulangi lagi. Apabila masyarakat melihat ada yang melakukan perusakan di wilayah pesisir didaerahnya maka sebaiknya melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwenang untuk diproses dan diselidiki secara hukum yang berlaku di Indonesia dengan apa yang sudah dilakukan, sehingga tidak ada yang mencontoh kejadian tersebut agar kekayaan sumberdaya laut tetap terpelihara dengan baik dan tidak terjadi kepunahan dalam sumberdaya lautnya dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan khususnya wilayah pesisir.

Terlihat jelas bahwa, menurut Al-Qur'an perbuatan manusia yang merusak alam terjadi karena manusia mengikuti hawa nafsunya yang menyesatkan dari jalan Allah dan melupakan hari perhitungan. Akibat lanjutan

dari ketidakmampuan menjaga hawa nafsunya adalah kerusakan alam yang fatal dan timbulnya berbagai adzab yang berat. Hawa nafsu merupakan penyebab utama lahirnya berbagai kerusakan yang disebabkan oleh manusia (Utami, U. 2008).

- Menurut penuturan Bapak S.H selaku nelayan pada alat tangkap sekoci, mengatakan bahwa:

"manusia tidak bisa disalahkan dalam hal ini mungkin saja yang menyebabkan kerusakan diakibatkan karena alam itu sendiri"

Dalam hal ini manusia tidak menyadari kalau perusakan yang terjadi disebabkan karena tangan manusia yang secara tidak langsung merusak lingkungan sumberdaya wilayah pesisir karena apa yang dilakukan nelayan ketika menangkap sumberdaya hasil laut tidak pernah memperhatikan apakah alat yang digunakan itu ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan dan kurangnya pengetahuan akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya wilayah pesisir.

- Kurangnya kesadaran nelayan karena sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menyebabkan apapun akan dilakukan demi untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Sampai-sampai nelayan tidak menyadari kalau dalam menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan dalam sumberdaya laut terutama pantai Tambakrejo.

4.6 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Undang-Undang dan Nilai-Nilai Religi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

4.6.1 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Undang-Undang

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan masyarakat di Desa Tambakrejo terhadap Undang-Undang tentang pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang disebabkan antara lain:

- Menurut penuturan Bapak ATS selaku pemilik kapal payang, mengatakan bahwa:

"disini dilarang menggunakan putas, kalau ada akan dibakar iya seluruh kapalnya pokoknya seluruh alat yang digunakan untuk mengambil hasil sumberdaya laut tersebut. Dibakar oleh masyarakat yang pada saat itu melihatnya"

"tidak adanya peraturan desa yang melarang minum-minuman keras, Kepala Desa Tambakrejo hanya sibuk memberantas judi saja"

"membandelnya masyarakat untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat"

"peraturan hukum yang mengatur daerah wilayah pesisir khususnya wilayah Jatim pada Undang-Undang perikanan tidak begitu tertib semenjak Pak Harto lengser"

Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah tapi karena belum adanya pengawasan yang maksimal dari pemerintah yang terkait sehingga masyarakat setempat mempertegas lagi hukum-hukum tersebut karena masih adanya nelayan yang masih tetap menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dalam mencari sumberdaya laut.

Pengawasan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara ketat dan konsisten (oleh instansi terkait dan LSM), dapat menekan atau mencegah kerusakan sumber daya alam. Akan tetapi, yang terpenting adalah kearifan dan kepedulian lingkungan semua komponen masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan penuh tanggung jawab (Utami, U. 2008).

Meskipun pemerintah dan masyarakat setempat telah berusaha untuk menjalankan hukum-hukum dari pemerintah tapi ada sebagian nelayan yang masih tetap menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dalam melakukan penangkapan ikan dan mengambil secara paksa hasil sumberdaya laut. Hal tersebut sangat meresahkan dalam kelangsungan hidup masyarakat di Desa Tambakrejo itu sendiri karena makin berkurangnya kekayaan sumberdaya laut yang dibanggakan terutama di bagian Pantai Selatan Kabupaten Blitar.

Kebijakan yang dibuat pada masa jabatan Pak Harto khususnya wilayah pesisir daerah Jawa timur sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah pada saat itu menjabat dan mendapatkan tanggapan yang baik pula dari masyarakat terutama dari nelayan setempat. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan karena hukum yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu benar-benar diterapkan dan diawasi semaksimal mungkin oleh pemerintah terkait dan juga karena pada waktu itu belum naiknya harga-harga bahan pokok berupa sembako serta sedikitnya jumlah pengangguran yang ada.

- Menurut penuturan dari Mas Snr selaku anak buah kapal (ABK) pada alat tangkap payang, mengatakan bahwa:

"saya ini tidak ngerti masalah Undang-Undang"

Kurangnya kesadaran nelayan dalam keikutsertaan apabila ada penyuluhan dari pemerintah Jawa timur atau Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) karena kegiatan tersebut sangat penting diketahui bagi nelayan agar mengetahui keuntungan dan kerugian dalam menjaga kelestarian lingkungan wilayah pesisir.

Mungkin tidak semua perundang-undangan seperti Undang-Undang Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya diberikan penyuluh kepada nelayan tetapi hanya yang dianggap penting saja yang

diberikan, tapi pada intinya penyuluh menyampaikan berita tentang pentingnya menjaga wilayah pesisir dan tidak boleh melakukan penangkapan ekosistem perairan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan menangkap hasil laut yang berlebihan.

- Menurut penuturan Mas Ali selaku anak buah kapal (ABK) pada alat tangkap payang, mengatakan bahwa:

"tidak pernah mendengar Undang-Undang"

Hal tersebut dapat disebabkan karena kesibukan sebagai nelayan dan juga bisa disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga menimbulkan tingkat kesadaran nelayan kurang dalam menanggapi program pemerintah terkait yang bertujuan agar kekayaan sumberdaya lingkungan khususnya wilayah pesisir tetap ada sampai anak cucu kita kelak.

4.6.2 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Religi

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan masyarakat di Desa Tambakrejo tentang nilai-nilai religi dapat disebabkan antara lain:

- Menurut penuturan dari Bapak S.H yang beragama Kristen, mengatakan bahwa:

"dalam agama Kristen mengajarkan untuk tetap menyembah Tuhan, dalam masalah sesaji di agama Kristen tidak boleh bergantung pada alam tapi bergantunglah pada Tuhan karena Tuhan yang memiliki segalanya"

"saya sebenarnya tidak setuju dengan diadakannya kegiatan peringatan 1 Syuro, setiap orang yang memiliki sekoci dikenai pungutan biaya 200 ribu untuk acara peringatan tersebut"

Pada dasarnya setiap manusia yang beragama pasti tidak setuju dengan kebiasaan masyarakat di Desa tersebut yang mengharuskan membuang sesajen/mengadakan peringatan 1 Syuro karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dirasakan secara nyata tapi untuk masa yang akan datang berupa pencemaran laut, walaupun peringatan 1

Syuro ini hanya adat yang selalu diadakan di pantai-pantai pada umumnya. Selain akan mempengaruhi lingkungan sumberdaya wilayah pesisir tetapi juga akan menambah biaya pengeluaran bagi nelayan yang akan digunakan dalam peringatan 1 Syuro, karena setiap peringatan tersebut yang mempunyai alat tangkap sekoci dikenai pungutan biaya Rp 200.000,- dalam 1 kapal yang biaya tersebut dipakai untuk kelangsungan acara peringatan 1 Syuro.

- Menurut penuturan Bapak Mjn selaku alat tangkap sekoci, mengatakan bahwa:

"saya tahu, kalau Shalat itu wajib hukumnya tapi apa boleh buat saya tidak pernah Shalat"

"mengenai masalah peringatan 1 Syuro, saya hanya ikut-ikutan saja karena sudah menjadi kebiasaan Desa Tambakrejo ini dan saya sebagai warga hanya melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan di sini kalau tidak mengerjakannya saya tidak enak. Kegiatan peringatan 1 Syuro ini pasti berlangsung setiap tahun"

"walaupun saya beragama Islam tapi saya tidak bisa membaca Al-Qur'an"

Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menyeimbangkan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam disekitar lingkungan kita tinggal untuk berkembang serta menjaga lingkungan agar tetap seimbang sangat penting dalam kelangsungan hidup.

- Menurut penuturan Bapak ATS selaku salah satu Tokoh Agama di Desa Tambakrejo, mengatakan bahwa:

"peringatan 1 Syuro di lakukan setiap tahun tapi dari tahun-ketahun mengalami penurunan karena ada kaitannya dengan dana. Peringatan 1 Syuro sebenarnya hanya hajad desa saja yaitu dengan bertujuan untuk membersihkan desa"

"kegiatan keagamaam di Desa Tambakrejo ini sangat bagus karena di setiap RT mempunyai 2 kelompok pengajian Yassinan dan Shalat di Masjid juga banyak isinya, diantara kebaikan desa ini ada juga keburukan yaitu banyaknya anak muda yang mabuk-mabukan oleh sebab itu banyak yang menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren dan diharapkan untuk kedepannya akan baik sifatnya. Tapi anehnya walaupun anak muda di desaini mabuk-mabukan tapi mereka tetap Shalat"

"Kepala Desa tidak pernah Sholat di Masjid, kalau saja pemimpinnya baik pasti baik juga rakyatnya. Tapi desa Tambakrejo ini sudah baik di bandingkan dengan Desa tetangga"

"di Desa ini mayoritas beragama Islam tapi ada sebagian Kristen hanya 10 rumah saja"

"Shalat sangat penting, ibaratnya rem pada motor agar tetap stabil"

"Peringatan 1 Syuro tidak mempengaruhi rizki, semua itu tergantung pada Allah yang memberi Rizki"

Peringatan 1 Syuro dari tahun ketahun mengalami penurunan karena ketiadaan dana dalam melaksanakan peringatan tersebut, kebanyakan masyarakat juga melaksanan peringatan tersebut karena adat pada umumnya di wilayah pantai dan juga hanya bertujuan untuk membersihkan desa saja. Walaupun di Desa Tambakrejo ini mempunyai kegiatan keagamaan tetapi yang dibahas hanya mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan dan makhluk yang sudah meninggal. Pergaulan anak-anak muda di Desa Tambakrejo ini juga perlu diperhatikan karena maraknya minum-minuman keras sehingga membuat resah para orangtua, sehingga menimbulkan inisiatif dari orangtua untuk menyekolahkan ke pondok pesantren yang diharapkan agar anak-anaknya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama berupa minum-minuman keras. Shalat sangat penting dan bermanfaat bagi pengontrol ketika kita ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama. Mendapatkan Rizki yang banyak tidak bisa di lihat apakah kita melaksanakan peringatan 1 Syuro atau tidak, karena hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan dalam memberikan Rizki yang banyak tergantung pada tingkat kerja keras manusia itu sendiri dalam mendapatkan Rizki yang halal dan dengan cara yang baik pula.

Dalam Tutik, T *et al.* (2008); kekhalifahan adalah amanah, maka seseorang pemimpin dapat diberikan amanah jika ia mampu menegakkan keadilan di muka bumi. Yaitu kerangka keadilan syariat Islam. Sedangkan hukum Islam tersebut bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qias.

Maka khalifah merupakan pilar penting yang dapat membawa perbaikan lingkungan. Seorang yang diberikan tanggung jawab sebagai khalifah haruslah bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan di bumi

- Menurut penuturan dari Bu Sgh selaku pedagang ikan di Desa Tambakrejo, mengatakan bahwa:

"sudah turun temurun dari nenek moyang, kalau tidak melakukan peringatan 1 Syuro takutnya ada bencana yang menanggung adalah masyarakat Desa Tambakrejo sendiri tapi sebenarnya Rizki hanya Allah yang mengatur"

"saya tidak bisa baca Al-Qur'an tapi sebenarnya saya ingin belajar membaca berhubung tidak ada yang mengajarnya ya sudah"

Walaupun masyarakat Desa Tambakrejo mengetahui bahwa sebenarnya Rizki hanya Allah saja yang mengatur tetapi karena sudah menjadi adat/kebiasaan bagi masyarakat untuk melaksanakan peringatan tersebut sehingga sebagai masyarakat mesti mau tidak mau harus melaksanakan karena sudah sangat melekat dipikiran setiap masyarakat di Desa Tambakrejo.

Ciri khas religi animisme-dinamisme adalah menganut kepercayaan roh-roh dan daya-daya gaib yang bersikap aktif. Prinsip roh aktif artinya kepercayaan animisme mengajarkan bahwa roh-roh orang mati tetap hidup dan bahkan menjadi sakti seperti dewa, bisa berbuat aktif mencelakakan atau sebaliknya, membantu menyelamatkan dan menyejahterahkan manusia atau masyarakat umat manusia.

Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Desa Tambakrejo sendiri meyakini bahwa adanya penunggu laut yang harus diberi sesajen pada peringatan 1 syuro, apabila tidak diberi sesajen maka akan terjadi bencana di Desa tersebut.

- Menurut penuturan Bu Stlh selaku pedagang ikan di Desa Tambakrejo, mengatakan bahwa:

"saya tidak bisa membaca Al-Qur'an tapi dulu saya bisa sedikit-sedikit dan sekarang sudah lupa kerena kesibukan dalam mencari uang"

Faktor yang mendasari masyarakat dalam mengenal lebih jauh tentang pemahaman/Agama, sangat kecil karena disebabkan kesibukan dalam mencari

uang dan faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk belajar mengenal lebih jauh tentang Agama yang dipercayainya saat ini.

- Menurut penuturan Bu Lgrh selaku pedagang ikan di Desa Tambakrejo, mengatakan bahwa:

"peringatan 1 Syuro itu hanya adat tapi mesti dilakukan walaupun itu adat"

Sebenarnya penduduk Desa Tambakrejo pada umumnya menyadari kalau peringatan 1 Syuro hanya adat, meskipun seperti itu peringatan 1 Syuro tetap dilaksanakan di salah satu Pantai Selatan Kabupaten Blitar ini karenanya hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang sering nenek moyang terdahulu.

- Menurut penuturan Bapak Smgn selaku menggunakan alat tangkap sekoci, mengatakan bahwa:

"biasanya mendapatkan informasi tentang Al-Qur'an dari pengajian dari lingkungan rumah"

"dalam masalah peringatan 1 Syuro itu tidak menjamin Rizki lancar karena Rizki hanya dari Tuhan"

Ada juga masyarakat yang menyadari betapa pentingnya mengetahui makna di dalam Al-Qur'an karena dari Kitab Suci Agama Islam tersebut kita dapat mengetahui bagaimana berhubungan baik antara Tuhan, manusia dan lingkungan alam sekitar dimana tempat kita tinggal dan menetap. Peringatan 1 Syuro tidak menjamin Rizki banyak atau tidak karena hanya Tuhanlah yang menentukan segalanya.

- Menurut penuturan Bapak M.S selaku pemilik kapal payang, mengatakan bahwa:

"membuang sesajen kelaut hasilnya sama saja antara membuang sesajen ataupun tidak membuang sesajen"

Masalah peringatan 1 Syuro ini sudah sangat kental sekali bagi masyarakat wilayah pesisir terutama di Desa Tambakrejo ini karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan jadi kalau tidak melaksanakannya malah

kelihatan aneh di pandang masyarakat lainnya, hasil tangkapan yang diperoleh dari melautpun sama saja tidak bisa di ukur apakah orang itu melaksanakan peringatan 1 Syuro apa tidak.

4.7 Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bagian metodologi penelitian, beberapa variabel yang diduga berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan wilayah pesisir dalam model regresi yaitu pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang, pengetahuan masyarakat terhadap Agama dan alasan/motivasi masyarakat merusak lingkungan.

Dari analisis regresi berganda menggunakan SPSS, berdasarkan hasil analisis statistika SPSS di peroleh hasil regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 7,693 + 0,051 X_1 + 0,174 X_2 - 0,218 X_3 + e$$

Dimana:

- Y = kerusakan lingkungan
- X1 = pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang
- X2 = pengetahuan masyarakat terhadap Agama
- X3 = alasan/motivasi masyarakat merusak lingkungan

Untuk lebih jelasnya hasil analisa regresi dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

No.	Variabel Bebas	Hasil Regresi	t hitung	t tabel
1.	Intersep (a)	7,693	2,471	2,110
2.	Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang (X1)	0,051	0,322	2,110
3.	Pengetahuan masyarakat terhadap Agama (X2)	0,174	2,162	2,110
4.	Alasan /motivasi masyarakat merusak lingkungan (X3)	- 0,218	- 0,755	2,110
5.	R ²	0,276		
6.	F	1,782		
7.	N	18		

Sumber: Data Primer yang diolah, 2009

Koefisien Determinasi (R²) merupakan besaran yang dipakai untuk menunjukkan seberapa besar variasi dependent dijelaskan oleh variable independent.

Nilai R² di dapat 0,276 hasil ini menunjukkan 27,6 % variable terikat dalam hal ini kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Tambakrejo dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang, pengetahuan masyarakat terhadap Agama dan alasan/motivasi merusak lingkungan. Sisanya yaitu 27,4 % di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model seperti referensi /pengaruh dari orang lain

Dari hasil analisa model regresi berganda dengan 3 variabel bebas yang telah dipilih dalam penelitian, maka akan dibahas masing-masing pengaruh variabel terikat (Y) kerusakan lingkungan. Berikut akan diuraikan seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap pemeliharaan lingkungan khususnya wilayah pesisir.

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Undang-Undang (X1)

Berdasarkan pengujian statistik (uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,322 sedangkan t tabel pada taraf kepercayaan 95 % ($\alpha = 0,05$) adalah sebesar

2,110 karena t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dengan demikian pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang tidak berpengaruh nyata terhadap kerusakan lingkungan.

Pengetahuan Masyarakat Terhadap Agama (X2)

Berdasarkan pengujian statistik (uji t) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,162 sedangkan t tabel pada taraf kepercayaan 95 % ($\alpha = 0,05$) adalah sebesar 2,110 karena t hitung lebih besar dari t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan demikian pengetahuan masyarakat terhadap agama mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kerusakan lingkungan dengan nilai koefisien regresi positif berarti semakin besar pengetahuan masyarakat terhadap Agama semakin kecilnya terjadi kerusakan lingkungan khususnya wilayah pesisir. Dari hasil regresi diperoleh koefisien X_2 sebesar 0,174 yang berarti bahwa kalau pengetahuan agama ditingkatkan sebesar 1 %, maka kerusakan lingkungan akan menurun sebesar 0,174 %.

Alasan /Motivasi Masyarakat Merusak Lingkungan (X3)

Berdasarkan pengujian statistik (uji t) di peroleh nilai t hitung sebesar 0,755 (nilai mutlak dari -0,755) sedangkan t tabel pada taraf kepercayaan 95 % ($\alpha = 2,110$) adalah sebesar 2,030 karena t hitung sebesar kecil dari t tabel dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh nyata terhadap kerusakan lingkungan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan dan program-program yang telah dibuat dan direncanakan pelaksanaannya oleh pemerintah dalam pemeliharaan lingkungan wilayah pesisir yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Diantara program-program tersebut telah tampak pada Undang-Undang Perikanan NO. 31 Tahun 2004 yang diberikan informasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Blitar pada Pasal 8 Ayat (1, 2, 3) dan Pasal 84 Ayat (1, 2, 3), dan Instruksi Gubernur Jawa Timur No. 1 tahun 2000 yang isinya "Melarang penggunaan Kompresor, bahan kimia/peledak". Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Blitar belum memberikan pengawasan secara langsung didalam penerapan hukum-hukum didaerah Desa Tambak itu sendiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berlaku nasional.
2. Faktor timbulnya kerusakan lingkungan wilayah pesisir di akibatkan salah satunya karena tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan penduduk terutama nelayan tentang pentingnya menjaga lingkungan wilayah pesisir. Pemahaman Agama yang kurang juga mempengaruhi sifat dari masyarakat yang lebih memilih merusak lingkungan wilayah pesisir daripada menjaga, walaupun adanya kegiatan keagamaan di Desa Tambakrejo hanya terfokus pada hubungan antara Tuhan dan manusia bukan terhadap Tuhan, manusia dan kepada lingkungan sekitar.
3. Peran pemerintah dalam pelestarian lingkungan wilayah pesisir telah baik dalam membuat peraturan dan kebijakan yang isinya penjagaan

lingkungan wilayah pesisir, namun sebaiknya pemerintah juga mengikutsertakan peran masyarakat terutama nelayan dalam kegiatan tersebut agar masyarakat mengetahui sangat pentingnya menjaga wilayah pesisir dengan baik.

4. Dari hasil analisis regresi didapat bahwa variabel pengetahuan masyarakat terhadap Agama (X2) berpengaruh secara nyata terhadap variabel kerusakan lingkungan (Y), sedangkan variabel alasan/motivasi masyarakat merusak lingkungan (X3) dan pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang (X1) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel kerusakan lingkungan.

Maksudnya adalah didalam pemahaman masyarakat setempat terhadap faktor Agama mempengaruhi kerusakan secara langsung yang ada di Pantai Tambakrejo tersebut sehingga diharapkan untuk Tokoh Agama setempat dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa pada saat Khutbah jum'at berlangsung dan dari kegiatan tersebut dapat mengurangi tingkat kerusakan yang terjadi di wilayah Pantai Tambakrejo sendiri.

5. Alasan masyarakat merusak lingkungan karena kurang kesadaran dan pemahaman tentang Undang-undang terhadap masyarakat setempat tentang lingkungan wilayah pesisir, hal tersebut dapat diakibatkan karena tingkat pendidikan mayoritas nelayan yang rendah dan watak dari nelayan keras serta karena biaya hidup yang semakin lama semakin mahal sehingga dapat mengakibatkan nelayan melakukan perusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem sumberdaya hayati di wilayah tersebut.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan bahwa:

1. Harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan khususnya wilayah pesisir dan juga hukum dalam Kitab Suci Al-Qur'an juga berperan yang sangat penting dalam menjalankan kerjasama antara tokoh Agama setempat dan masyarakat terutama nelayan. Pada hakekatnya adalah dengan cara memperkenalkan dan menyampaikan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga lingkungan khususnya wilayah pesisir. Pemerintah, masyarakat dan tokoh Agama adalah mitra yang baik dalam bekerjasama untuk melaksanakan setiap tahapan dan tugas dari masing-masing peran dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir. Tahapan yang harus dilakukan secara umum adalah perencanaan, dan mengadakan evaluasi. Pemahaman yang baik terhadap masyarakat setempat dan perbaikan kualitas masyarakat dalam pandangan terhadap lingkungan wilayah pesisir, pentingnya adanya penyuluhan dan pelatihan ketrampilan selain mencari ikan di laut pada masyarakat dengan tokoh Agama yang berperan untuk memberikan pengetahuan dalam sudut pandang Agama, sehingga di harapkan masyarakat sekitar mempunyai pengetahuan tentang pentingnya menjaga dengan tidak memakai alat tangkap yang dapat merusak ekosistem perairan dan melestarikan ekosistem sumberdaya hayati. Penyuluhan yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan dalam sudut pandang hukum perundang-undangan dan dalam kitab Suci Al-Qur'an adalah dengan cara: manfaat dan fungsi dari menjaga lingkungan wilayah pesisir dengan baik tanpa memakai alat tangkap yang dapat merusak ekosistem

perairan, memberikan pengetahuan dibidang Agama pada saat khutbah jum'at dan pengajian rutin yang dilakukan oleh penduduk sekitar. Sebagai pihak yang sangat besar perannya dalam penjagaan ekosistem sumberdaya perairan masyarakat perlu adanya lembaga non formal/kelompok masyarakat yang peduli akan ekosistem sumberdaya hayati, sehingga terdapat pihak yang menjadi fasilitator masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ekosistem perairan secara optimal dan lestari. Kelompok masyarakat perlu dibentuk dalam rangka menjaga program pelestarian sumberdaya lingkungan khususnya wilayah pesisir, dengan kerjasama antara masyarakat setempat. Melalui kelompok masyarakat dapat dilaksanakan program menjaga lingkungan yang baik tanpa menggunakan alat tangkap yang berbahaya bagi ekosistem perairan, penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dan hukum dalam Al-Qur'an, penyebaran informasi teknik pengalihan fungsi dari penangkapan ke arah budidaya, penyampaian hukum dalam Al-Qur'an melalui khutbah jum'at dan pengajian diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat setempat tentang lingkungan karena kerusakan lingkungan khususnya wilayah pesisir terjadi akibat perbuatan tangan dari manusia itu sendiri.

2. Status kerusakan sumberdaya yang terjadi diakibatkan karena masyarakat setempat tidak menjaga lingkungan dengan baik, yang mengakibatkan rusaknya ekosistem perairan sehingga mau tidak mau pemerintah dan masyarakat sekitar harus saling bekerjasama untuk mengadakan rehabilitasi hutan mangrove dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat didalam pemeliharannya serta peran pemerintah selaku penyuluh untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana sistem penjagaan bibit mangrove yang baik yang sudah

ditanam. Sangat baiknya agar pemerintah dan masyarakat membuat kelompok yang di dalamnya ada yang bertugas mengawasi jalannya pertumbuhan bibit mangrove bukan hanya sekedar menanam tetapi juga menjaga keadaan disekitar lahan bibit yang ditanam agar tidak terganggu oleh karena adanya aktivitas manusia ataupun hewan yang hidup disekitar lahan yang ditanami bibit mangrove.

3. Penyadaran melalui jalur pendidikan adalah salah satu sarana tempat untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat setempat dalam suatu kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir mengakibatkan sangat penting apabila dimulai dari penyuluhan untuk orang dewasa khususnya bagi nelayan setempat melalui penjelasan dibidang hukum perundang-undangan yang mana didalamnya dijelaskan bahwa penyadaran tentang penjagaan wilayah pesisir sangat penting dilakukan karena kekayaan yang ada di perairan tidak dapat diperbaharui seperti awal ketika Allah menciptakan lautan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa ekosistem yang dapat diperbaharui dari kekayaan sumberdaya perairan. Selain dilakukan penyuluhan kepada orang dewasa juga dapat dilakukan penyadaran melalui dimasukkannya kurikulum dibidang pelajaran sekolah, dengan harapan agar anak-anak dapat juga mengetahui betapa pentingnya menjaga kelangsungan kehidupan di perairan serta memakai alat tangkap yang dapat merusak ekosistem perairan. Walaupun kurikulum pengetahuan tentang lingkungan wilayah pesisir ini dilakukan di sekolah-sekolah. Selain dimasukkannya kurikulum tentang pengetahuan pentingnya menjaga lingkungan dalam pelajaran sekolah dasar, juga dapat menggunakan kegiatan perlombaan yang diikuti oleh anak-anak sekolah dasar dengan tujuan agar anak-anak lebih dekat terhadap lingkungan khususnya wilayah pesisir. Perlombaan ini perlu melibatkan

semua pihak agar kesadaran terhadap lingkungan dapat berhasil dengan baik, melalui program yang dapat mendukung kesadaran lingkungan ini yaitu dengan diadakan perlombaan mengarang dan mewarnai dengan harapan agar anak-anak lebih mengenal manfaat dari menjaga lingkungan khususnya wilayah pesisir untuk kehidupan mendatang karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa.

4. Diharapkan agar dalam proses kesadaran terhadap status kerusakan yang terjadi di Desa Tambakrejo agar masyarakat sadar dan segera melakukan proses rehabilitasi terhadap kerusakan apa saja yang terjadi sebelum semuanya terlambat untuk diperbaiki. Proses yang perlu diperhatikan ketika menjalankan rehabilitasi agar tepat pada sasaran yang ingin diperbaiki, hal ini sangat penting adanya dukungan dari banyak pihak diantaranya adalah masyarakat setempat yang dapat mengawasi jalannya proses rehabilitasi perbaikan hutan mangrove dan juga ekosistem wilayah pesisir yang telah mengalami kerusakan. Proses rehabilitasi penanaman hutan mangrove, meliputi: penyediaan benih dengan dana dari pemerintah dan kerjasama yang baik didalam penanaman bibit mangrove tersebut hal ini dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah terkait, penjagaan dalam proses pemeliharaan dilaksanakan secara baik oleh masyarakat setempat dan pengawasan terhadap bibit mangrove tersebut.
5. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar responden yang diambil lebih banyak agar hasil yang didapat lebih maksimal untuk mengetahui sejauh mana hubungan baik antara Tuhan Sang Pencipta Seluruh Alam, manusia dan lingkungan tempat tinggal manusia dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. 2001. **Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an**. Penerbit Paramadina. Jakarta
- Ahmadi, A. 1991 dalam Fatimah, S. 2003. **Perilaku Nelayan Terhadap Perubahan Tata Letak Pelabuhan Di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur**. Skripsi. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya Malang. Hal 10
- Azwar, S. 1995 dalam Fatimah, S. 2003. **Perilaku Nelayan Terhadap Perubahan Tata Letak Pelabuhan Di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur**. Skripsi. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya Malang. Hal 10
- Coremap. 2001. **Buku Panduan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM) COREMAP**. Kpp. Kantor Pengelolaan Program COREMAP-LIPI. Jakarta
- Dahuri, R. 2003. **Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia**. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utara. Jakarta
- Dahuri, R, *et al.* 2004. **Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu**. PT Pradnya Paramita. Jakarta
- Delianur. 2007. **Eco Theology**. http://dunia.pelajar_islam.or.id/?p=412. Di akses Pada 16 Desember 2007 pukul 02:25 pm
- Diposaptono, S. 2001. **Riset Teknologi Pesisir Kini dan Masa Datang**. Prosiding. Graha Sucofindo. Jakarta
- Diposaptono, S. 2008. **Karakteristik Laut Pada Kota Pantai**. <http://slm.nilim.go.jp/ge/SEMI2/Proceedings/Makalah%2013.doc>. 22 September 2008 pukul 08:25 am
- Djarir, I, *et al.* 2004. **Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa**. Gama Media. Semarang
- Garnasih, Y. 2008. **Revisi UU Lingkungan Hidup Sangat Mendesak**. www.Suarapembaruan.com. Diakses Pada 15 Oktober 2008 pukul 06.30 pm
- Harmoni, A. 2008. **Perilaku**. <http://www.harmoni.net/index.php?option=com>. Diakses Pada 15 Oktober 2008 pukul 04.25 pm
- Idris, I. 2001. **Kebijakan Pengelolaan Pesisir Terpadu Di Indonesia**. Prosiding. Graha Sucofindo. Jakarta

KAI. 2003. **Kemitraan Air Indonesia**. <http://www.inawater.com/news-Berita> KAI. Diakses Pada 11 November 2008 Pukul 10.58 am

Mawardi, M. 2008. **Kerusakan Lingkungan dan Cara Pandang Manusia Tentang Alam**. <http://www.muhammaadiyah.or.id/index.php?option=com.content&task=view&id=1009&Itemid=93.23>. Diakses Pada 15 Oktober pukul 06.25 pm

Pagoray, H. 2003. **Lingkungan Pesisir dan Masalahnya Sebagai Daerah Aliran Buangan Limbah**. http://tumoutou.net/702_07134/henny_pagoray.htm.12. Diakses Pada 16 Desember 2007 pukul 02:03 pm

Panjaitan, R, et al. 2003. **Pembangunan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat Dan Tantangannya (Studi Kasus Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai)**. http://tumoutou.net/702_07134/71034_13.htm. 16 Desember 2007 Pukul 13:40 pm

Permana, B, A. 2001. **Karakteristik dan Ekosistem Wilayah Pesisir**. <http://djail26.blogspot.com/2008/06/karakteristik-dan-ekosistem-wilayah.html>. Diakses Pada 22 Oktober 2008 pukul 08:32 am

Plus, B, C. 2009. **Kabupaten Blitar**. <http://ciptakarya.pu.go.id/peta/imerges/kab/12/at-3502.jpg>. Diakses Pada 30 Juli 2009 pukul 07.26 am

Rahardjo. 1979 dalam Subaidah, L. 2004. **Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Dalam Menjaga Kelestarian Terumbu Karang Di Kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo Jawa Timur**. Skripsi. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya Malang. Hal 15

Sears, O, et al. 1985 dalam Fatimah, S. 2003. **Perilaku Masyarakat Nelayan Terhadap Perubahan Tata Letak Pelabuhan Di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur**. Skripsi. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya Malang. Hal 10

Singarimbun. M dan Effendi, S. 2008. **Metode Penelitian Survei**. Edisi Revisi. LP3ES. Jakarta

Sitohang, K. 2008. **Pedagogi Ecosophy**. <http://www.suarapembaruan.com/News/2008/01/12/Editor/edit03.html>. Diakses Pada September 15 pukul 06:20 pm

Sugianto dalam Wahyuni, K. 2007. **Analisis Faktor Penentu Dalam Mengonsumsi Ikan Pada Rumah Tangga Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Treggalek Jawa Timur**. Skripsi. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya Malang. Hal 15

- Supriharyono. 2000. **Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis**. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Soemarwoto, O. 2001. **Ekologi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pembangunan**. Penerbit Djambatan. Jakarta
- Sofa. 2008. **Metode Analisis Isi, Reliabilitas dan Validitas dalam Metode Penelitian Komunikasi**.
<http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/metode- analisis- isi- reliabilitas- dan- validitas- dalam- metode- penelitian- komunikasi/>. Diakses Pada 11 Desember 2008 Pukul 10.11 am
- Syahputra, B. 2007. **Ramah Lingkungan Dalam Pandangan Islam**.
<http://bennsyah.edublogs.org/2007/01/06/ramah-lingkungan-dalam-pandangan-islam/>. Diakses Pada 12 Desember 2007 pukul 02:23 pm
- Syam, N. 2007. **Madzhab-Madzhab Antropologi**. Lkis. Yogyakarta
- Utami, U. 2008. **Konservasi Sumber Daya Alam**. UIN-Malang Press. Malang
- Yin, R. 2002. **Studi Kasus: Desain dan Metode**. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Zainal, R. 2007. **Kelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Islam**.
http://www.bangrusli.net/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=38. Diakses Pada 16 Desember 2007 pukul 02:44 pm

DAFTAR PERTANYAAN

1. Berapa lama Bapak/Ibu/Sdr/i tinggal di Desa Tambakrejo?
2. Adakah Anda memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan Bapak/Ibu/Sdr/i saat ini:
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apa Bapak/Ibu/Sdr/i pernah mendengar Undang-Undang tentang: (1) Undang-Undang Perikanan, (2) Undang-Undang Pesisir, (3) Undang-Undang Lingkungan Hidup, (4) Undang-Undang Konservasi. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?
 - a. Pernah
 - b. Tidak
4. Bagian mana saja yang Bapak/Ibu/Sdr/i fahami dari Undang-Undang tersebut?
5. Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui hukum tersebut (mendapat informasi dari mana)?
6. Ada yang menyatakan bahwa biasanya di setiap Pantai-pantai selalu mengadakan peringatan 1 Syuro/membuang sesajen ke laut. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?
 - a. Setuju
 - b. Tidak tahu
 - c. Tidak Setuju
7. Apa Anda pernah mendengar dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 41 yang isinya "Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia". Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?
8. Apa Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui maksud dari makna isi Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 41?
 - a. Ya
 - b. Tidak

9. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Sdr/i mendapatkan Informasi untuk mengetahui isi dari Surat Ar-Rum Ayat 41 tersebut?

10. Ada yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan Rizki yang halal harus melakukan pekerjaan yang baik dan dengan cara yang benar. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

11. Ada yang menyatakan bahwa menjadi Makhluq Allah yang baik adalah yang tidak meninggalkan Kewajibannya yaitu Shalat 5 waktu. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

12. Ada yang menyatakan bahwa kita Harus Shalat Berjamaah di Masjid/Mushola terutama bagi laki-laki yang sudah Baliq. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

13. Ada yang menyatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi rasa malu jika melakukan perbuatan merusak alam (lingkungan) dan akan menurunkan harga diri orang tersebut. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

14. Ada yang menyatakan bahwa untuk menjaga lingkungan wilayah pesisir yang baik adalah menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan agar kekayaan sumberdaya wilayah pesisir tetap ada sampai anak cucu kita kelak. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

15. Ada yang menyatakan bahwa Berdagang dengan menggunakan Timbangan yang adil/tidak curang adalah bentuk dari kejujuran seorang dalam Berdagang. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

16. Ada yang menyatakan bahwa Berzakat dikeluarkan untuk fakir miskin pada setiap akhir tahun yang gunanya untuk membersihkan harta yang kita miliki agar orang yang tidak mampu disekitar kita merasakan sedikit kebahagiaan.

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

17. Ada yang menyatakan bahwa Menjalin Tali Silaturahmi sangat penting bagi hidup bermasyarakat sesama manusia. Bagaimana pandangan

Bapak/Ibu/Sdr/i tersebut?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

18. Ada yang menyatakan bahwa Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah didalam sebuah kebijakan yang isinya wajibnya menjaga kelestarian sumberdaya pantai misalnya: menjaga ekosistem terumbu karang, dll.

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

19. Ada yang menyatakan bahwa pemakaian formalin pada makanan akan merusak kesehatan. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

20. Ada yang menyatakan bahwa sumberdaya wilayah pesisir patut dijaga kelestariannya agar tetap ada. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

21. Ada yang menyatakan bahwa sumberdaya wilayah pesisir patut dijaga kelestariannya agar tetap ada. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

22. Menurut penilaian Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah mengekang kegiatan penangkapan nelayan/masyarakat di desa tambakrejo. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

23. Ada yang menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di lingkungan wilayah pesisir akibat dari perbuatan tangan manusia itu sendiri. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

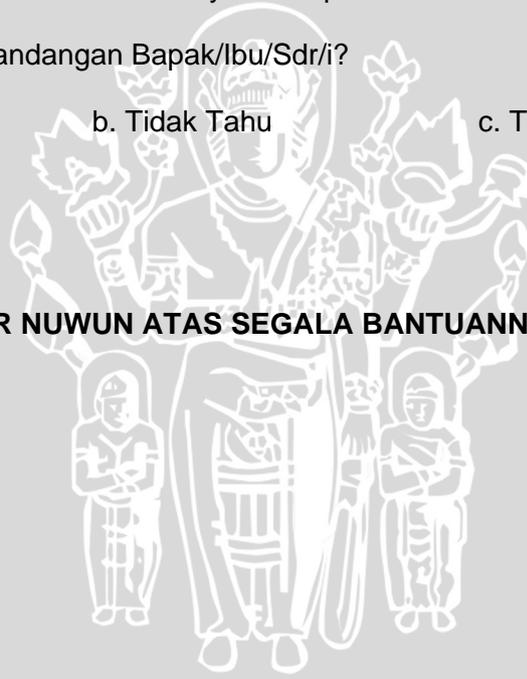
24. Ada yang menyatakan bahwa apabila seseorang menjaga Shalatnya maka dia pasti akan menjaga lingkungannya. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- A, Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

25. Ada yang menyatakan bahwa membuang sesajen ke laut maka hasil tangkapan nelayan akan lebih banyak dari pada tidak membuang sesajen ke laut. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Sdr/i?

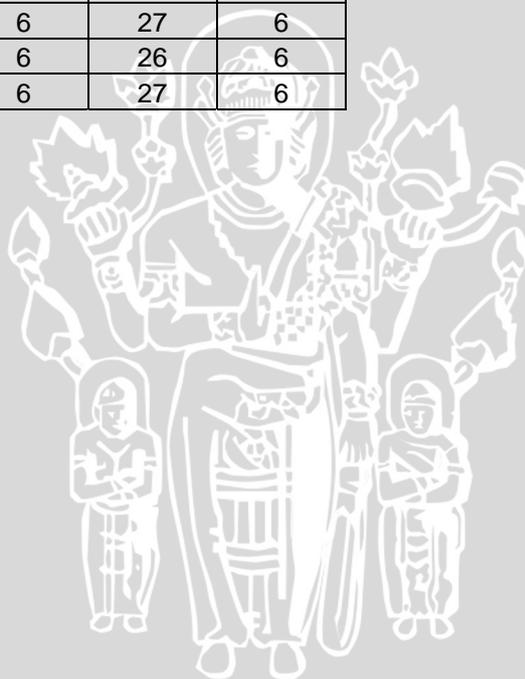
- a. Setuju b. Tidak Tahu c. Tidak Setuju

MATUR NUWUN ATAS SEGALA BANTUANNYA



Lampiran 3. Data SPSS

NO	Y	X1	X2	X3
1	10	5	26	6
2	7	7	5	6
3	10	17	20	6
4	12	9	24	6
5	12	9	22	9
6	12	7	24	9
7	10	7	25	9
8	12	8	21	6
9	10	9	24	6
10	11	9	29	6
11	10	6	26	6
12	10	8	24	6
13	15	7	25	3
14	8	7	24	6
15	12	9	26	6
16	12	6	27	6
17	12	6	26	6
18	10	6	27	6



Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
y	10.8333	1.79050	18
x1	7.8889	2.60969	18
x2	23.6111	5.13510	18
x3	6.3333	1.41421	18

Correlations

		y	x1	x2	x3
Pearson Correlation	y	1.000	-.017	.492	-.186
	x1	-.017	1.000	-.179	.011
	x2	.492	-.179	1.000	-.030
	x3	-.186	.011	-.030	1.000
Sig. (1-tailed)	y	.	.474	.019	.230
	x1	.474	.	.239	.483
	x2	.019	.239	.	.453
	x3	.230	.483	.453	.
N	y	18	18	18	18
	x1	18	18	18	18
	x2	18	18	18	18
	x3	18	18	18	18

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	x3, x1, x2 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.526 ^a	.276	.121	1.67840	.276	1.782	3	14	.197	2.362

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.061	3	5.020	1.782	.197 ^a
	Residual	39.439	14	2.817		
	Total	54.500	17			

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

b. Dependent Variable: y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.693	3.113		2.471	.027					
	x1	.051	.159	.075	.322	.752	-.017	.086	.073	.968	1.033
	x2	.174	.081	.500	2.162	.048	.492	.500	.492	.967	1.034
	x3	-.218	.288	-.172	-.755	.463	-.186	-.198	-.172	.999	1.001

a. Dependent Variable: y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	x1	x2	x3
1	1	3.857	1.000	.00	.01	.00	.00
	2	.087	6.664	.00	.74	.10	.03
	3	.044	9.342	.00	.03	.36	.61
	4	.012	18.106	1.00	.22	.54	.36

a. Dependent Variable: y

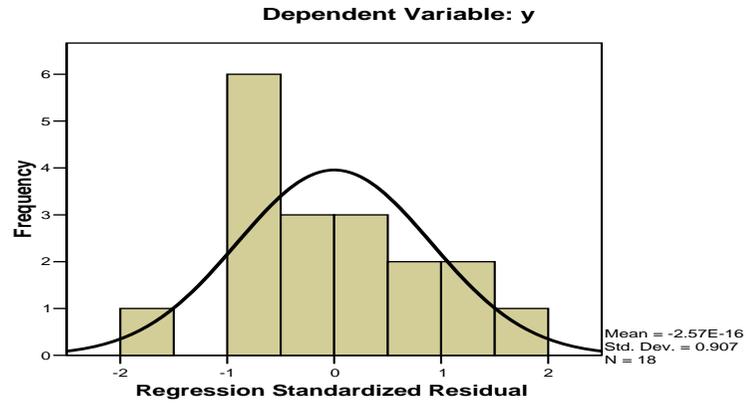
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7.6171	11.9017	10.8333	.94126	18
Residual	-2.92817	3.24505	.00000	1.52313	18
Std. Predicted Value	-3.417	1.135	.000	1.000	18
Std. Residual	-1.745	1.933	.000	.907	18

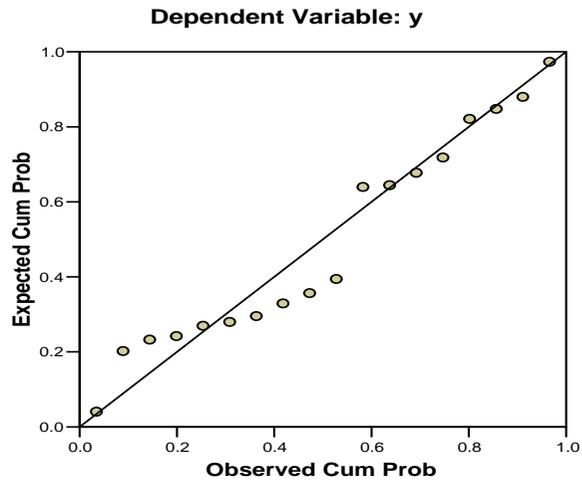
a. Dependent Variable: y

Chart

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

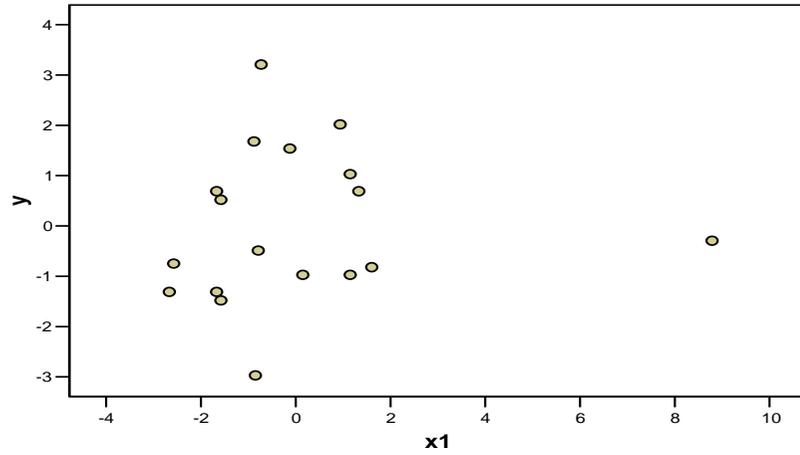


TAS BRAWIJAYA



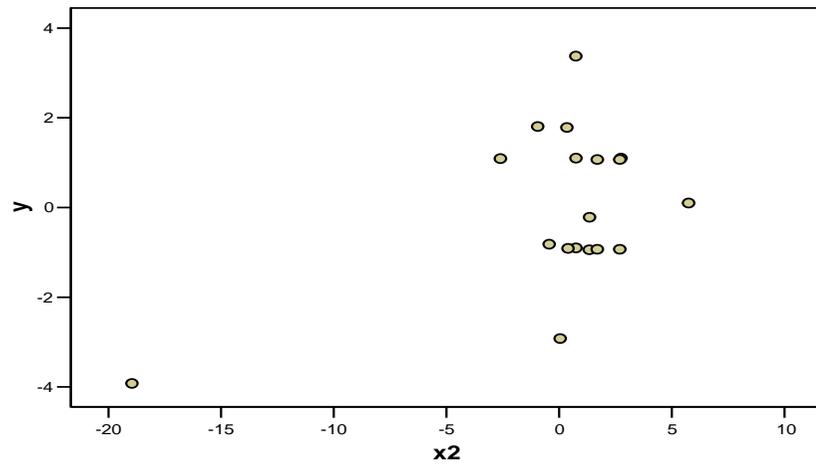
Partial Regression Plot

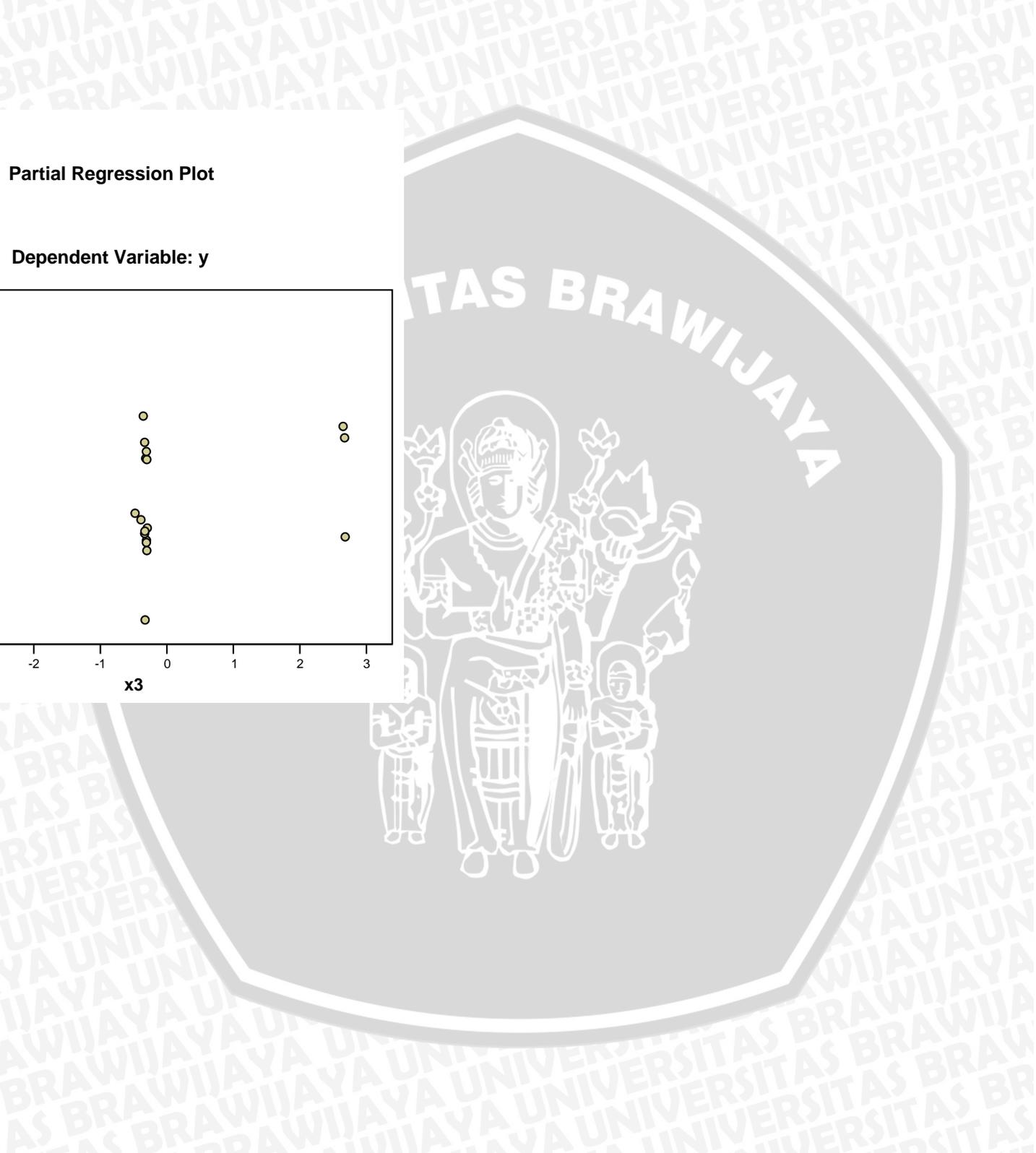
Dependent Variable: y



Partial Regression Plot

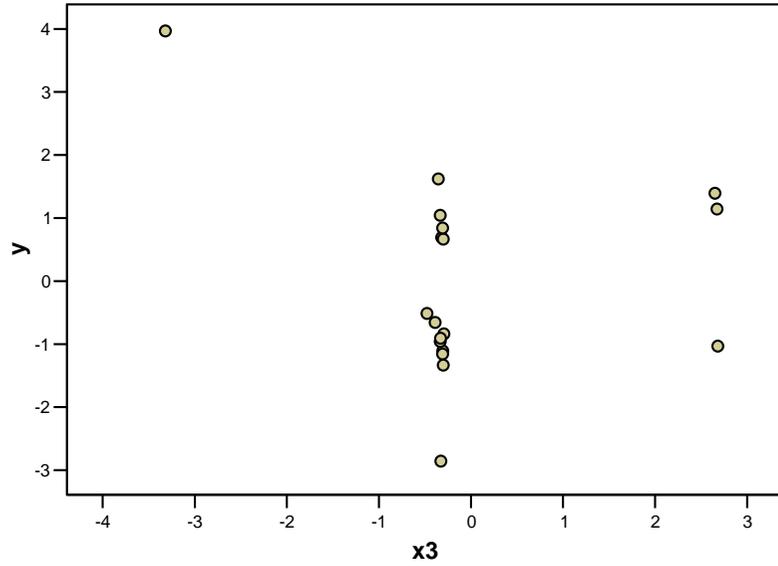
Dependent Variable: y





Partial Regression Plot

Dependent Variable: y





4.8 Konsistensi Pengelolaan Lingkungan Pesisir Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Dan Al-Qur'an

Konsistensi antara perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan Al-Qur'an dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hukum Perundang-Undangan dari Pemerintah dan Al-Qur'an

No	Sumber Hukum	Sumberdaya yang Dilindungi	Perintah	Larangan	Sangsi	Berita (informasi yang ingin disampaikan)
A.	Al-Qur'an					
1.	Q.s. Ar-Rum (30): 41 Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)."	Lingkungan darat dan laut	Agar manusia menjaga lingkungan darat dan laut	-	-	Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia
2.	Q.s. Al-A'raf (7): 56 Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."	Seluruh isi bumi	Agar tetap menjaga bumi dengan baik	Jangan berbuat kerusakan di bumi	-	-
3.	Q.s. Asy-Su'aara (26): 152 Artinya: "yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan."	Seluruh bumi	Untuk tidak berbuat kerusakan di bumi dan mengadakan perbaikan	Agar tetap menjaga lingkungan	-	-
B.	Hukum dalam Undang-Undang					
1.	Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 10 Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:	Lingkungan hidup	Mematuhi hukum dan tidak membuat pencemaran dan perusakan	menjaga lingkungan agar tetap bebas dari pencemaran dan perusakan	Adanya kegiatan membayar ganti rugi	-

	<p>a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat <i>preemptif</i>, <i>preventif</i>, dan <i>proaktif</i> dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>f. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup</p> <p>g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup</p> <p>h. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat</p> <p>i. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.</p> <p>Pasal 34 (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan /perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan /kegiatan untuk membayar ganti rugi dan /melakukan tindakan tertentu. (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.</p>		lingkungan hidup			
2.	<p>Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 8 dan 84: Pasal 8 (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan /pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan</p>	Seluruh sumberdaya laut	Tidak melakukan penangkapan sumberdaya laut menggunakan bahan-bahan	agar tetap menjaga sumberdaya laut agar tetap lestari	pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,-	-

<p>biologis, bahan peledak, alat /bangunan yang dapat merugikan dan/ membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan /lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Nakhoda /pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan, dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /cara, dan /bangunan yang dapat merugikan dan /membahayakan kelestarian kelestarian sumberdaya ikan dan /lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p> <p>(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan /operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /cara, dan /bangunan yang dapat merugikan dan /membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan /lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 84</p> <p>(1) setiap orang yang dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ cara, dan/ bangunan yang dapat merugikan dan/ membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan /lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Nakhoda /pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ cara, dan /bangunan yang dapat merugikan dan /membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan /lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab Perusahaan perikanan, dan/ operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/</p>		<p>yang dapat merusak sumberdaya itu sendiri</p>			
--	--	--	--	--	--

	lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).					
3.	<p>Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 3 Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.</p> <p>Pasal 37 (1) Peranserta rakyat dalam konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna (2) Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>	seluruh sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	agar terwujudnya kelestarian dan keseimbangan sumberdaya hayati	tidak boleh merusak kelestarian dan keseimbangan sumberdaya hayati	-	-
4.	<p>Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 5 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 35 Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi</p>	sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	dapat mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian	dilarang menimbulkan kerusakan ekosistem, menggunakan bahan peledak dan dilarang melakukan kegiatan yang dianggap dapat mengakibatkan pencemaran laut	-	-

<p>c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/ bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang</p> <p>d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang</p> <p>e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>f. menebang melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan/ zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan /kegiatan lain</p> <p>h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun</p> <p>i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan /budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan /pencemaran lingkungan dan /merugikan masyarakat sekitarnya</p> <p>j. melakukan penebangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/ budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan /pencemaran lingkungan dan/ merugikan masyarakat sekitarnya</p> <p>k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan /ekologis dan sosial dan /budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan /pencemaran lingkungan dan/ merugikan masyarakat sekitarnya; serta</p> <p>l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan /merugikan masyarakat sekitarnya.</p>					
---	--	--	--	--	--

Dapat dilihat pada tabel 7, tentang hukum-hukum perundang-undangan yang diatur dan dibuat oleh pemerintah dan dalam Kitab Suci Agama Islam yaitu Al-Qur'an.

Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan suatu keniscayaan. Artinya, antara manusia dengan lingkungan terdapat keterhubungan, keterkaitan dan keterlibatan timbal balik yang tidak dapat ditawar. Lingkungan dan manusia terjalin sedemikian eratnya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga manusia tanpa keterjalinannya dengan lingkungan tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat pula dipikirkan bahkan tidak ada.

Hukum dalam Kitab suci Al-Qur'an yang telah diatur oleh Allah dan diturunkan ke bumi melalui wahyu-wahyu yang disampaikan kepada para Nabi untuk kesejahteraan manusia di bumi: diantara isinya agar manusia tidak melakukan kerusakan lingkungan di darat dan di laut dan melakukan perbaikan di bumi. Sebagai makhluk Khalifah (pemimpin) di bumi, manusia mempunyai tanggung jawab besar terhadap bumi untuk tidak membuat kerusakan di bumi dan menjaga keseimbangan di darat dan di bumi. Karena sesungguhnya kerusakan yang terjadi di bumi diakibatkan karena tangan manusia itu sendiri dan manusia tidak menyadarinya dan diharapkan agar manusia berdo'a kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap.

Peran pemerintah dalam menjadikan lingkungan khususnya wilayah pesisir tetap terpelihara kekayaan sumberdaya lautnya, antara lain meliputi; melakukan pembinaan dimasyarakat, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, menyampaikan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan wilayah pesisir, dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan agar sumberdaya laut tetap ada sampai anak cucu kita kelak. Menggerakkan kesadaran peran serta dari masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga lingkungan wilayah pesisir dan pengelolaan sumberdaya laut yang ramah

lingkungan tanpa merusak, melalui pendidikan dan penyuluhan; menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup khususnya wilayah pesisir dan diharapkan dengan diadakan kegiatan tersebut masyarakat dapat lebih mengetahui peranan penting lingkungan khususnya wilayah pesisir. Adapun peran serta masyarakat meliputi; menjaga kelestarian dan perlindungan terhadap sumberdaya lingkungan; dalam menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, memelihara kelestarian fungsi dari lingkungan hidup itu sendiri dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan cara memberikan informasi yang baik dan sesuai dengan tingkat pendidikan dalam menyampaikannya agar dapat diterima dan di terapkan oleh masyarakat setempat.

Dalam hukum yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan, peran pemerintah dan peran masyarakat telah diatur dengan baik agar dapat tercipta hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Tetapi karena kurangnya kerjasama yang baik antara kedua pihak tersebut sehingga peran masing-masing pihak belum dapat terlaksana dengan maksimal. Adapun peran pemerintah dalam menetapkan setiap kebijakan yang diatur dalam suatu undang-undang terutama dalam hal perencanaan program pembangunan khususnya wilayah pesisir, mengenai masalah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan sumberdaya laut. kadang-kadang dalam penyampaianya pemerintah kurang memperhatikan tingkat pendidikan nelayan dalam memahami setiap informasi yang diberikan oleh penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakat setempat dan peran dari pemerintah setempat juga kurang maksimal dalam pengawasannya. Dalam hal pembinaan peran serta masyarakat pada saat berada di lingkungannya sangat

kurang, hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat setempat dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir.

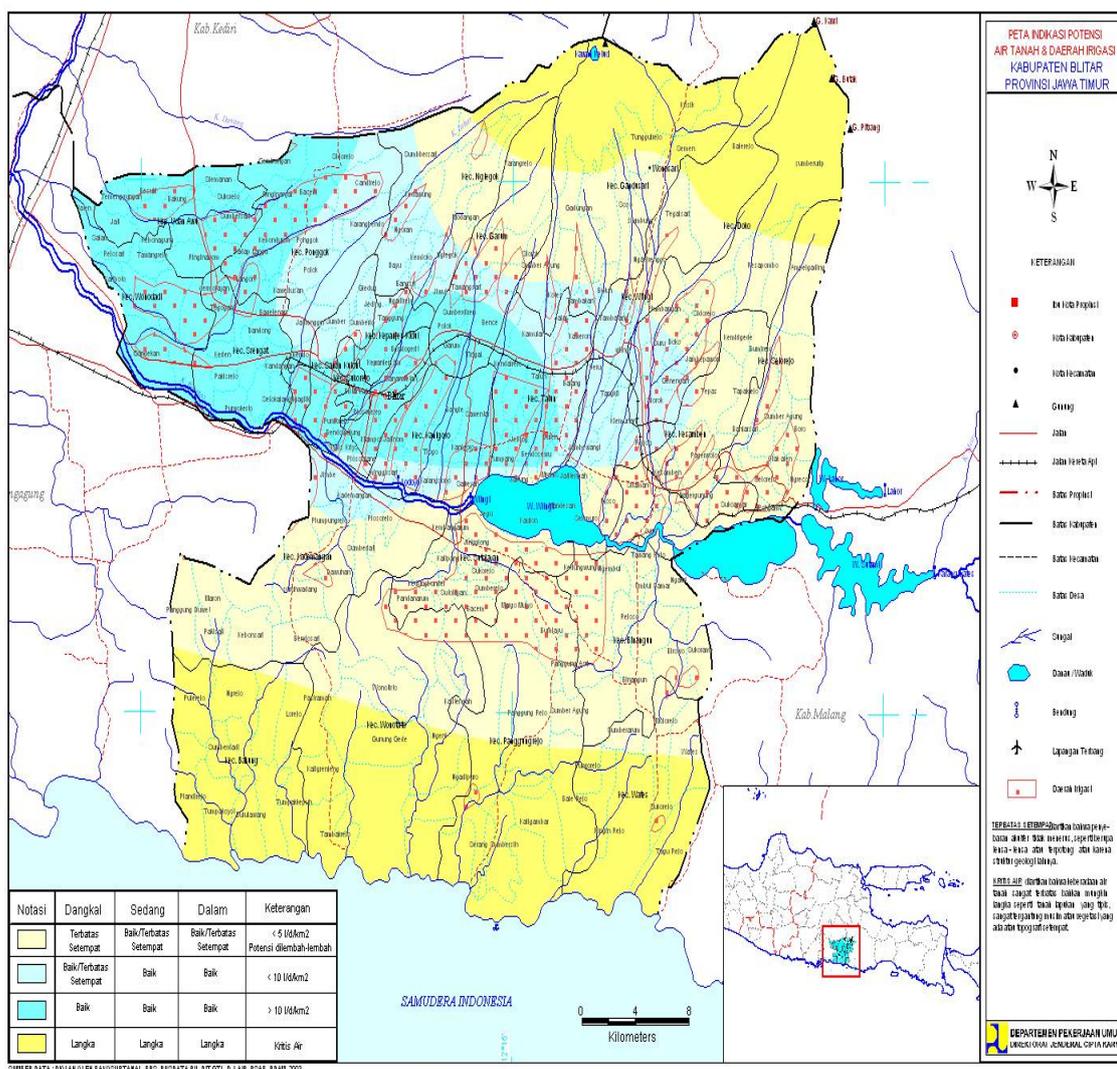
Demikian pula pada masyarakat dalam menjalankan aktivitas di lapang sering melakukan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak sumberdaya lingkungan wilayah pesisir dan masyarakat sendiri kadang-kadang sering untuk berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan pengolahan sumberdaya walaupun masyarakat sendiri sebagian besar sudah mengetahui adanya peraturan /perundangan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam rangka konservasi sumberdaya alam hayati. Hal tersebut dapat terjadi akibat kurang adanya sosialisasi kemanfaatan terhadap upaya konservasi pada masyarakat, tuntutan ekonomi yang mengharuskan nelayan merusak lingkungan dan kurangnya masyarakat mendapatkan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan terhadap masyarakat, sehingga proses penyadaran terhadap pentingnya menjaga konservasi sumberdaya alam hayati ini belum ada di diri masyarakat itu sendiri karena kurang pemahaman terhadap undang-undang tersebut.

Adapun proses dalam membantu penyadaran pada pemerintah dan masyarakat ini tidak hanya dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan saja tetapi harus dilakukan dengan cara masyarakat memahami dan lebih tertarik serta terkesan agar tidak mudah dilupakan oleh aparat pemerintah dan masyarakat, misalnya dengan cara diberikan pemutaran film yang di dalamnya menjelaskan tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan dan beserta dampak yang ditimbulkan apabila terjadi kerusakan lingkungan. Selain itu juga, perlu diciptakan dari diri masyarakat tersebut norma dan nilai hukum tentang pemanfaatan sumberdaya khususnya wilayah pesisir sehingga hukum yang sudah ada tidak dapat di pandang dari segi sanksinya saja.

Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa pada dasarnya proses dalam pembangunan masih sangat perlu diperbaiki oleh pemerintah, dari segi perencanaan sampai dengan pelaksanaannya di lapang sehingga program yang direncanakan tersebut dapat berhasil dengan baik. Walaupun pemerintah berusaha untuk memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan syarat untuk berhasil tetapi pada kenyataannya pelaksanaan konsep ini di lapang masih cukup banyak mengalami hambatan.

Agar pembangunan dapat berhasil dan merata, maka harusnya adanya hubungan yang baik antara Allah sebagai pencipta seluruh alam, manusia, dan lingkungan sekitar. Sehingga di harapkan agar masyarakat dapat memahami konsep-konsep dalam Al-Qur'an bahwasannya tidak boleh mengadakan kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan lingkungan di darat dan di laut. Selain ditekankan pemahaman terhadap Al-Qur'an tentang penyebab kerusakan lingkungan di sebabkan sebagian besar dari tangan manusia, masyarakat juga harus dapat menerapkan dan memahami dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah di dalam menjaga lingkungan khususnya wilayah pesisir dalam hal pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya hayati.

Lampiran 1. Peta Kabupaten Blitar



Sumber: <http://ciptakarya.pu.go.id/peta/images/kab/12/at-3502.jpg>

